PROFIL PENDIDIKAN

KABUPATEN TANGERANG

2024







DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga terselesaikannya buku "**Profil Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2024**" ini tepat pada waktunya.

Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi dinas Pendidikan serta Bappeda terkait perencanaan Pendidikan di Kabupaten Tangerang ke depannya. Selain itu, buku profil ini juga dapat bermanfaat bagi para pembaca ataupun instansi-instansi terkait lainnya.

Di dalam buku ini ditampilkan antara lain terkait capaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Pendidikan Dasar dan PAUD Kabupaten Tangerang, jumlah satuan pendidikan, jumlah peserta didik, jumlah pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana dan entitas lainnya pada jenjang pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Nonformal (PAUD dan Dikmas).

Tangerang, Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
Dadan Gandana, S.STP, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Isu-Isu Strategis 2
1.4 Demografi Kabupaten Tangerang 3

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN
2.1 Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi 6
2.2 Struktur Organisasi 7
2.3 Rencana Strategis Dinas Pendidikan 8
2.4 Program Dinas Pendidikan dan Capaian 14

BAB III DATA KEPENDIDIKAN
3.1 Angka Partisipasi 18
3.2 Data Pokok Pendidikan Dasar 22
3.3 Data Pokok Pendidikan Nonformal 43
3.4 Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Tangerang 4
Gambar 1.2 Persentase Penduduk 5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang 8
Gambar 3.1 Tingkat Partisipasi PAUD Sederajat (APK PAUD) Usia 5-6 Tahun Kabupaten Tangerang 19
Gambar 3.2 Tingkat Partisipasi SD Sederajat Kabupaten Tangerang 20
Gambar 3.3 Tingkat Partisipasi SD Sederajat Kabupaten Tangerang per Kecamatan 20
Gambar 3.4 Tingkat Partisipasi SMP Sederajat Kabupaten Tangerang 21
Gambar 3.5 Tingkat Partisipasi SMP Sederajat Kabupaten Tangerang per Kecamatan 22
Gambar 3.6 Sebaran SD Berdasarkan Status per Kecamatan 23
Gambar 3.7 Sebaran SMP Berdasarkan Status per Kecamatan 24
Gambar 3.8 Satuan Pendidikan Berdasarkan Akreditasi 25
Gambar 3.9 Persentase Peserta Didik Berdasarkan Status Satuan Pendidikan 26
Gambar 3.10 Persentase Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin 27
Gambar 3.11 Persentase Pendidik Berdasarkan Status Satuan Pendidikan 29
Gambar 3.12 Persentase Pendidik Berdasarkan Jenis Kelamin 30
Gambar 3.13 Persentase Pendidik SD Berdasarkan Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan 31
Gambar 3.14 Persentase Pendidik SMP berdasarkan Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan 32
Gambar 3.15 Persentase Pendidik SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 32
Gambar 3.16 Persentase Pendidik SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 33
Gambar 3.17 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin 34
Gambar 3.18 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepegawaian 35

Gambar 3.19 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 36
Gambar 3.20 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 37
Gambar 3.21 Jumlah Sarana Prasarana berdasarkan Jenis 39
Gambar 3.22 Persentase Sarana Prasarana SD menurut Kondisi 42
Gambar 3.23 Persentase Sarana Prasarana SMP menurut Kondisi 43
Gambar 3.24 Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal 45
Gambar 3.25 Sebaran Data PAUD 45
Gambar 3.26 Sebaran Data PKBM 46
Gambar 3.27 Persentase Peserta Didik/ Wajib Belajar 47
Gambar 3.28 Persentase Pendidik Pendidikan Nonformal 48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tangerang 2024-2026 Terkait Pendidikan 2
Tabel 1.2 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tangerang 3
Tabel 1.3 Penduduk Berdasarkan kelompok Usia Pendidikan 5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja 2024-2026 11
Tabel 2.2 Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2022 13
Tabel 2.3 Tabel Permasalahan Pendidikan Kabupaten Tangerang 13
Tabel 2.4 Program Dinas Pendidikan Tahun 2024-2026 14
Tabel 3.1 Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Status 23
Tabel 3.2 Peserta Didik Berdasarkan Jenjang Satuan Pendidikan 26
Tabel 3.3 Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin 27
Tabel 3.4 Peserta Didik dan Rombongan Belajar (Rombel) SD 27
Tabel.3.5 Peserta Didik dan Rombongan Belajar (Rombel) SMP 28
Tabel 3.6 Jumlah Pendidik Berdasarkan Status Satuan Pendidikan 29
Tabel 3.7 Jumlah Pendidik Berdasarkan Jenis Kelamin 29
Tabel 3.8 Jumlah Pendidik SD Berdasarkan Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan 30
Tabel 3.9 Jumlah Pendidik SMP Berdasarkan Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan 31
Tabel 3.10 Jumlah Pendidik SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 32
Tabel 3.11 Jumlah Pendidik SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 33
Tabel 3.12 Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin 34
Tabel 3.13 Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepegawaian 35
Tabel 3.14 Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan 35
Tabel 3.15 Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik 36
Tabel 3.16 Pengawas Sekolah jenjang SD dan SMP 37
Tabel 3.17 Tenaga Penunjang Kependidikan SD 38
Tabel 3.18 Tenaga Penunjang Kependidikan SMP 39
Tabel 3.19 Jumlah Sarana Prasarana berdasarkan Jenis Sarana 39

Tabel 3.20 Kepemilikan Toilet SD 40
Tabel 3.21 Kepemilikan Toilet SMP 40
Tabel 3.22 Ketersediaan Sarana Prasarana SD dan SMP 41
Tabel 3.23 Jumlah Sarana Prasarana SD menurut Kondisi 42
Tabel 3.24 Jumlah Sarana Prasarana SMP menurut Kondisi 43
Tabel 3.25 Lembaga Pendidikan Nonformal 44
Tabel 3.26 Data Peserta Didik/ Warga Belajar 47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki arah kebijakan merealisasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Visi Pemerintah Kabupaten Tangerang yaitu Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera. Misi yang diamanatkan adalah Meningkatkan Penerapan Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Bermasyarakat menuju Masyarakat yang Religius; dan Meningkatkan Akses Mutu dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas dan Sehat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memiliki tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Buku Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang disusun dalam upaya menjadi acuan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, pada buku ini disajikan tentang entitas data yang mendukung terwujudnya program pembangunan pendidikan yaitu satuan pendidikan/ sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), peserta didik dan substansi pendidikan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan.

Harapan Dinas Pendidikan di masa yang akan datang yaitu mampu memberikan layanan pendidikan secara optimal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya profil Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang adalah untuk memberikan gambaran umum Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang secara komprehensif dengan situasi dan isu yang berkembang sehingga menjadikan Dinas Pendidikan sebagai bagian dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berkontribusi dalam mencapai target kinerja sesuai visi misi Kabupaten Tangerang. Profil Dinas Pendidikan menjadi acuan program dan kegiatan di tahun mendatang sebagai bahan perencanaan untuk pemerataan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta perbaikan manajemen pendidikan.

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang adalah hasil evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026, target capaian kinerja Tahun 2024 dan isu strategis daerah, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tangerang 2024-2026 Terkait Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1. Peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Peningkatan akses mutu layanan PAUD 3. Peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan 4. Peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan 5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam	1. Pemenuhan kebutuhan ruang kelas untuk peserta didik 2. Sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan PAUD bagi pengembangan potensi anak 3. Peningkatan standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 4. Meningkatkan pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		bidang administrasi sekolah 6. Peningkatan kualitas pembelajaran 7. Meningkatkan kunjungan perpustakaan 8. Mengoptimalkan kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	5. Peningkatan akses dan sarpras perpustakaan

1.4 Demografi Kabupaten Tangerang

a. Peta Wilayah

Kabupaten Tangerang merupakan kabupaten yang berada di wilayah Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Ibu kota kabupaten adalah Tigaraksa. Luas wilayah Kabupaten Tangerang 959,61 km^2 yang terdiri atas 29 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 246 Desa. Wilayah Kabupaten Tangerang di wilayah utara berbatasan dengan Laut Jawa, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang dan wilayah Timur berbatasan dengan Kota Tangerang. Berikut daftar 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang.

Tabel 1.2 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tangerang

No.	Kode Wilayah	Nama kecamatan
1	36.03.01	BALARAJA
2	36.03.18	CIKUPA
3	36.03.23	CISAUK
4	36.03.05	CISOKA
5	36.03.17	CURUG
6	36.03.32	GUNUNG KALER
7	36.03.04	JAMBE
8	36.03.02	JAYANTI
9	36.03.28	KELAPA DUA
10	36.03.09	KEMIRI
11	36.03.14	KOSAMBI

No.	Kode Wilayah	Nama kecamatan
12	36.03.06	KRESEK
13	36.03.07	KRONJO
14	36.03.20	LEGOK
15	36.03.08	MAUK
16	36.03.33	MEKAR BARU
17	36.03.22	PAGEDANGAN
18	36.03.15	PAKUHAJI
19	36.03.19	PANONGAN
20	36.03.12	PASAR KEMIS
21	36.03.11	RAJEG
22	36.03.16	SEPATAN
23	36.03.30	SEPATAN TIMUR
24	36.03.29	SINDANG JAYA
25	36.03.31	SOLEAR
26	36.03.10	SUKADIRI
27	36.03.27	SUKAMULYA
28	36.03.13	TELUKNAGA
29	36.03.03	TIGARAKSA



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Tangerang

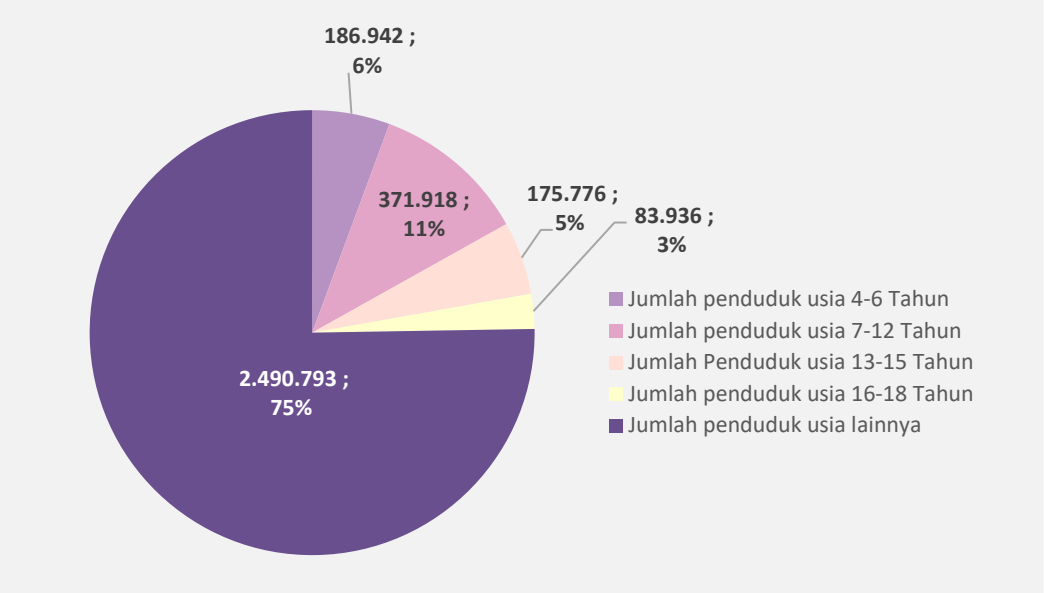
b. Penduduk

Penduduk Kabupaten Tangerang berjumlah 3.309.365 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk usia sekolah 4 sampai 18 tahun 818.572 jiwa.

Tabel 1.3

Penduduk Berdasarkan kelompok Usia Pendidikan

No	Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah penduduk usia 4-6 Tahun	96.980	89.962	186.942
2	Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun	192.780	179.138	371.918
3	Jumlah Penduduk usia 13-15 Tahun	91.034	84.742	175.776
4	Jumlah penduduk usia 16-18 Tahun	41.773	42.163	83.936
5	Jumlah penduduk usia lainnya	1.261.274	1.229.519	2.490.793
Jumlah penduduk seluruhnya		1.683.841	1.625.524	3.309.365



Gambar 1.2

Persentase Penduduk

(**Sumber Data**: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, 2024 semester 1)

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN

2.1 Latar Belakang Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang memiliki tugas membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang Pendidikan;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Pendidikan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan program kerja DISDIK;

b. mengoordinasikan dengan instansi/lembaga lain

c. terkait di bidang pendidikan; membina pegawai di lingkungan DISDIK untuk meningkatkan kinerja pengawai;

d. mengarahkan, membimbing, melakukan supervisi, menga'i/asi, memantau dan mengendalikan penyelenggara, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;

e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan

f. pelayanan umum di bidang pendidikan; mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;

g. melaporkan pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran di bidang Pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

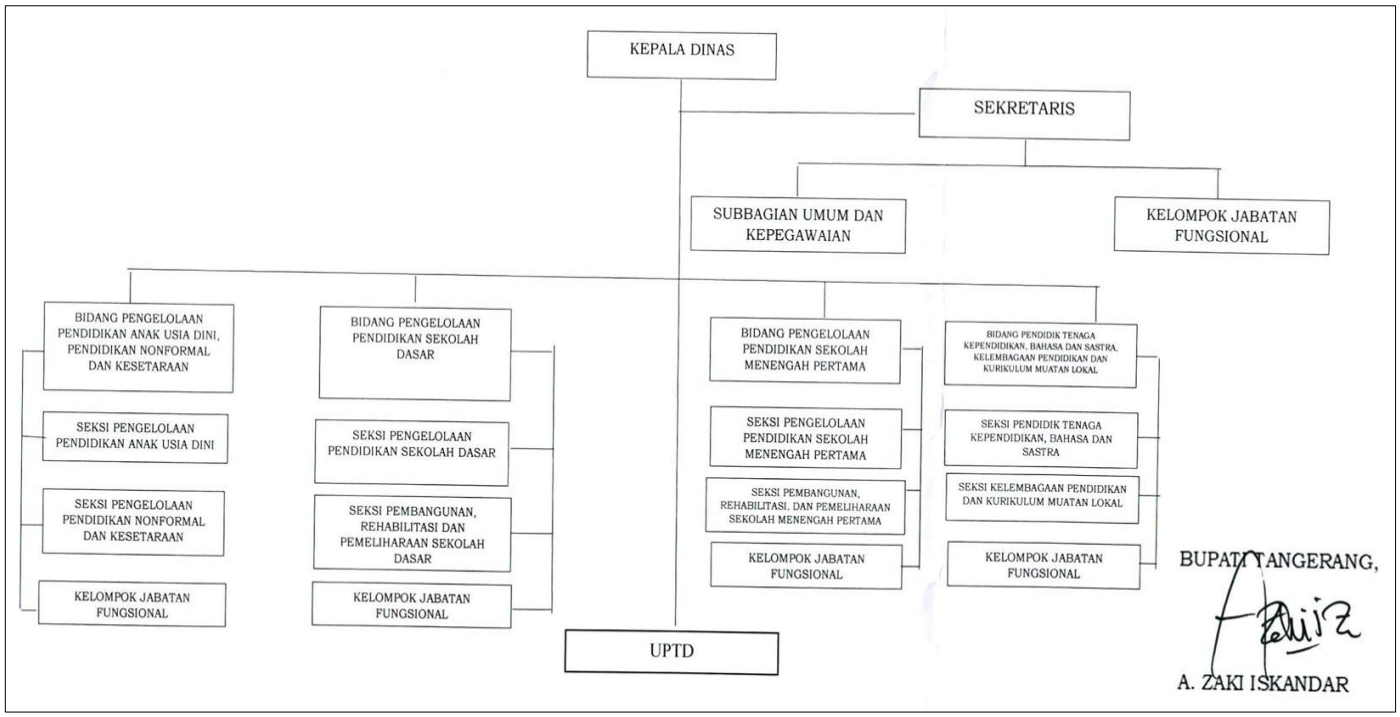
2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikanterdiri dari:

A. Kepala;
B. Sekretaris, terdiri atas:
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
   2. Kelompok Jabatan Fungsional
C. Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia dini, Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan
   1. Seksi Pengelolaan Pendidikan Usia Dini
   2. Seksi Pengelolaan Pendidikan Nonformal dan Kesetaraan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional
D. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   1. Seksi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   2. Seksi Pengelolaan Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sekolah dasar
   3. Kelompok jabatan fungsional
E. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   1. Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   2. Seksi pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   3. Seksi pembangunan, rehabilitas, dan pemeliharaan Sekolah Menengah Pertama
   4. Kelompok Jabatan Fungsional
F. Bidang Pendidik, Tenaga Kependidikan, Bahasa dan Sastra, Kelembagaan Pendidikan, dan Kurikulum Muatan Lokal

1. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan, Bahasa, dan Sastra
2. Seksi Kelembagaan Pendidikan dan Kurikulum Muatan Lokal
3. Kelompok Jabatan Fungsional

G. UPTD



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

2.3 Rencana Strategis Dinas Pendidikan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan perencanaan strategisnya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2024-2026 merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026). Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Kinerja tujuan dan sasaran dapat diukur dan selanjutnya dievaluasi dengan indikator yang ditetapkan. Indikator berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

Penentuan indikator berfungsi untuk memberikan batasan pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat berjalan dengan efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki. Perumusan tujuan, sasaran, dan indikator merupakan tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh.

Perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Berbeda dengan periode 2024-2026, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tangerang merumuskan tema Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025.

a. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang

Periode penyusunan RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025, yang merupakan tahap Usaha Peningkatan Berkelanjutan. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten periode tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam RPJPD. Visi pembangunan sebagaimana tertuang dalam dalam RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025 adalah:

"Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani."

Yang dimaksud dengan:

a. Daya Saing (*Competitive Forces*) adalah Kemampuan/kekuatan adaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

   Daya Saing Daerah adalah kemampuan perkonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan regional, nasional dan global. Daya saing daerah terkait erat dengan Perkembangan Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam serta Potensi Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, Kinerja Pemerintahan dan kebijakan Pemerintah, Manajemen dan Ekonomi Makro.

b. Masyarakat Madani (*Civil Society*) adalah masyarakat yang menjadikan agama (hubungan vertikal dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal antar sesama manusia dan mahluk hidup lainnya) sebagai tolok ukur kehidupan sehari-hari. Masyarakat Madani menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan/ persaudaran / kekeluargaan (*egaliterianisme*), penghargaan didasarkan kepada prestasi, keterbukaan (*inclusivisme*) dan partisipasi, adil dan demokratis, merdeka (*independent*) dari segala "penguasaan" manusia atas manusia lainnya, juga masyarakat yang bebas (*freedom*) dari pertentangan sosial yang anarkis dan destruktif.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

b. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Untuk mendukung keberhasilan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang berdasarkan Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Tangeramg 2024-2026, yaitu:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Kinerja			Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,97	73,27	73,55	73,82	74,1	74,1
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,68	0,68	0,69	0,7	0,71	0,71

Untuk mencapai tujuan dan sasaran target kinerja 2024-2026 maka Dinas Pendidikan memiliki strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

Strategi Dinas Pendidikan

1. Peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun;
2. Peningkatan akses mutu layanan PAUD;
3. Peningkatan akses dan mutu layanan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
4. Peningkatan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan;
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam bidang administrasi sekolah;
6. Peningkatan kualitas pembelajaran;
7. Meningkatkan kunjungan perpustakaan;
8. Mengoptimalkan kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan.

Arah Kebijakan

1. Pemenuhan kebutuhan ruang kelas untuk peserta didik;
2. Sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan PAUD bagi pengembangan potensi anak;
3. Peningkatan standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Meningkatkan pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik;
5. Peningkatan akses dan sarpras perpustakaan.

Selain Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja, Dinas Pendidikan juga memiliki target dan capaian lainnya yaitu SPM bidang Pendidikan. SPM bidang pendidikan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada peserta didik.

SPM pendidikan diatur dalam Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan tentang: Jenis dan penerima pelayanan dasar, Mutu pelayanan dasar, Pencapaian SPM Pendidikan, Pelaporan dan evaluasi.

SPM pendidikan terdiri dari SPM pendidikan daerah provinsi dan SPM pendidikan daerah kabupaten/kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah provinsi meliputi pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sementara itu, jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan.

Berikut adalah capaian SPM Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2022.

Tabel 2.2 Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2022

No.	Jenis Pelayaanaan Dasar	Target SPM	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Kesenjangan
A	SPM PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	67,72	67,72	32,28
2	Pendidikan Dasar	100	98,07	98,07	1,93
3	Pendidikan Kesetaraan	100	96,63	96,63	3,37

Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja, Dinas Pendidikan dapat dicapai jika permasalahan-permasalahan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang dapat diselesaikan. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya:

Tabel 2.3 Tabel Permasalahan Pendidikan Kabupaten Tangerang

Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
Pendidikan	1. Belum maksimalnya pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 2. Rasio peserta didik terhadap ruang kelas belum ideal; 3. Masih terdapat peserta didik yang putus sekolah; 4. Belum meratanya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan; 5. Masih rendahnya peran orang tua terhadap pentingnya pendidikan PAUD bagi pengembangan potensi anak; 6. Masih kurangnya jumlah TK Negeri 7. Terdapat Lembaga PAUD dan Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang belum memenuhi SNP;

Urusan Pembangunan Daerah	Permasalahan
	8. Terdapat anak usia PAUD yang belum memperoleh Pendidikan PAUD; 9. Belum meratanya pendidikan Non Formal/Kesetaraan; 10. Masih terdapat ATS yang belum terlayani; 11. Masih rendahnya standar kualifikasi/tingkat pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan; 12. Belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; 13. Belum optimalnya linearitas pendidikan/program studi pendidik; 14. Kurangnya dan rendahnya kualitas tenaga administrasi sekolah; 15. Belum maksimalnya pengembangan potensi, bakat, dan minat peserta didik; 16. Belum maksimal pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka; 17. Masih kurangnya sarana pendukung pembelajaran.

2.4 Program Dinas Pendidikan dan Capaian

Program Dinas Pendidikan di Tahun 2024 hingga 2026 terdiri atas 5 Program besar yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4 Program Dinas Pendidikan Tahun 2024-2026

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada akhir	Nama Kegiatan
				2024	2025	2026		
				target	target	target	target	
1	**Meningkatnya akses dan layanan pendidikan**	**Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**	**8,92**	**9,52**	**9,82**	**10,12**	**10,12**	
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	**12,85**	**12,87**	**12,88**	**12,89**	**12,89**	
		Persentase Pencapaian SPM Pendidikan	**87,45**	**89,45**	**90,45**	**91,45**	**91,45**	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,17	100,00	100,00	100,00	100,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada akhir	Nama Kegiatan
				2024	2025	2026		
				target	target	target	target	
		Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	96,59	100,00	100,00	100,00	100,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	83,11	100,00	100,00	100,00	100,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		Persentase Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Menetapkan Kurikulum Muatan Lokal	0	100,00	100,00	100,00	100,00	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi minimal D4/S1	0	90,00	91,00	92,00	92,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada akhir	Nama Kegiatan
				2024	2025	2026		
				target	target	target	target	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal)	0	80,00	85,00	90,00	90,00	Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
		Persentase Rekomendasi perizinan Pendidikan yang diterbitkan (PAUD/SD/SMP dan Pendidikan Non Formal)	0	75,00	77,00	79,00	79,00	Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan NonFormal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
		Nilai AKIP OPD	**80,51**	**80,61**	**80,71**	**80,81**	**80,91**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Tingkat pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen administrasi dan sarpras kantor (%)	0	100,00	100,00	100,00	100,00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen dan kompetensi pegawai (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen administrasi dan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah

No.	Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/*impact*/ *outcome*)	Kondisi Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Kondisi Kinerja pada akhir	Nama Kegiatan
				2024	2025	2026		
				target	target	target	target	
		sarpras kantor (%)						
		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen administrasi dan sarpras kantor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Tingkat pemenuhan dukungan manajemen administrasi dan sarpras kantor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB III
DATA KEPENDIDIKAN

Profil Data Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang 2024 bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) baik untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal (PNF) kondisi data tanggal 31 Oktober 2024. Selain Dapodik, sumber data yang digunakan adalah data Emis (Platform Sistem Pendataan Pendidikan di Kementerian Agama) untuk data peserta didik dan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tangerang. Dalam profil ini juga ditampilkan capaian angka partisipasi (APK, APM, dan APS) dari Kabupaten Tangerang Tahun 2024.

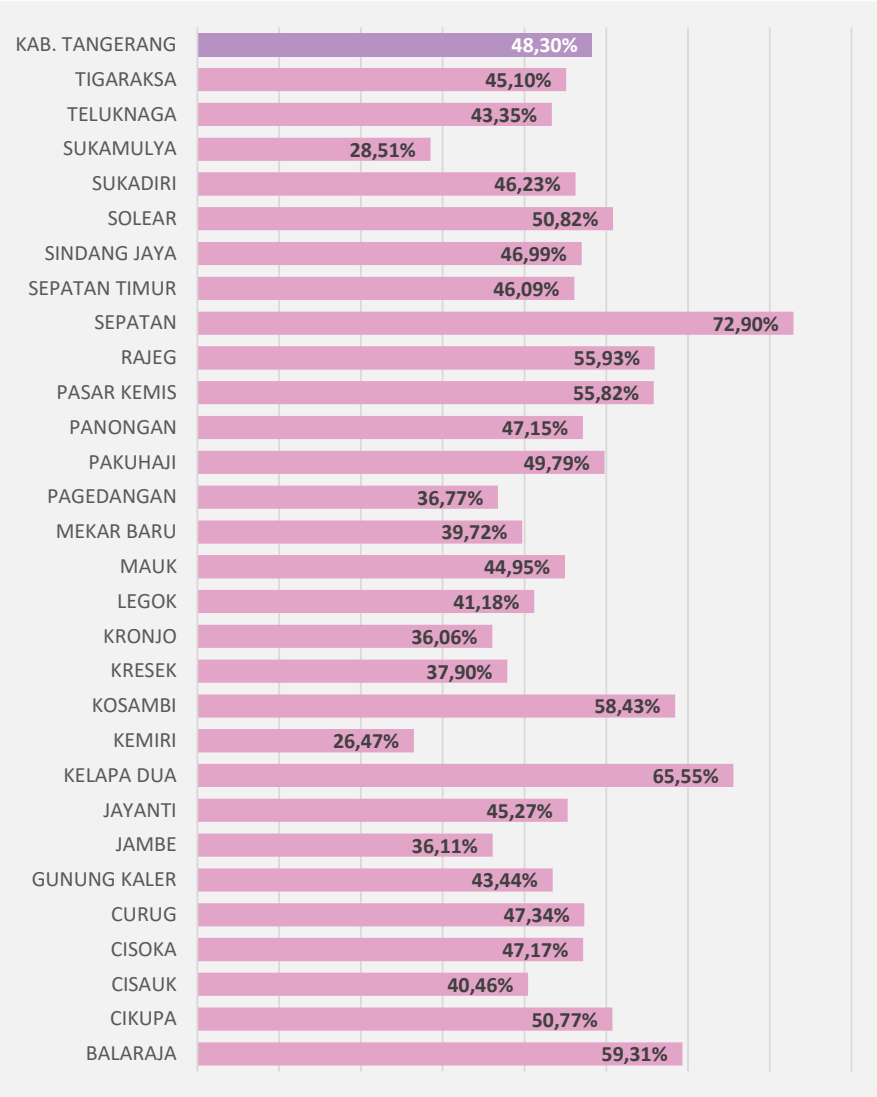
3.1 Angka Partisipasi

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk (khususnya usia sekolah) untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut usia sekolah yang berada disekolah.

Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator, antara lain: Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ada tiga indikator yang digunakan untuk capaian yaitu Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

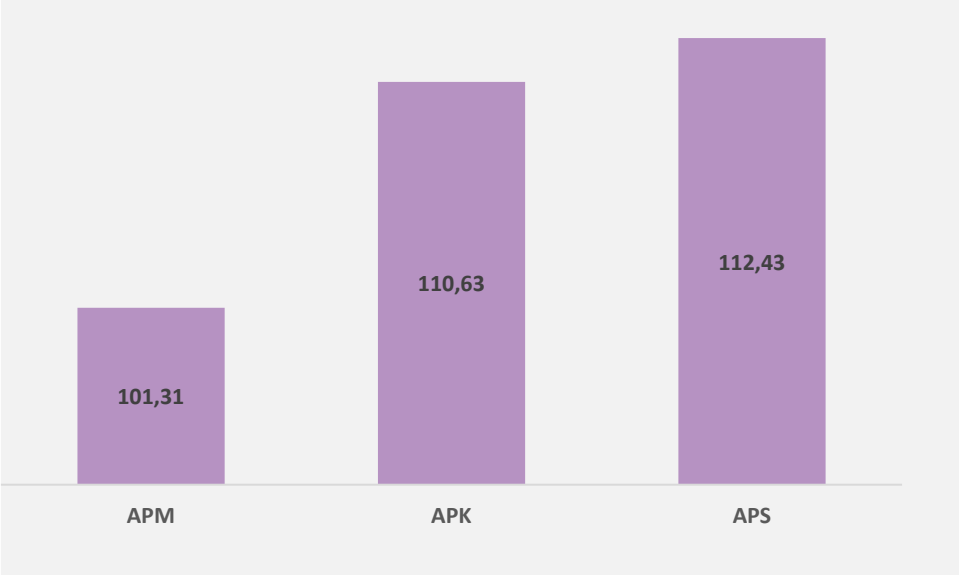
Berikut disajikan capaian tingkat partisipasi penduduk Kabupaten Tangerang untuk PAUD sederajat usia 5-6 tahun, SD sederajat, dan SMP sederajat. Dalam hal

ini yang dimaksud dengan PAUD sederajat adalah jumlah peserta didik dari TK/RA, SD sederajat adalah jumlah peserta didik dari SD/MI/Paket A. Sedangkan SMP sederajat adalah jumlah peserta didik dari SMP/MTs/Paket B.



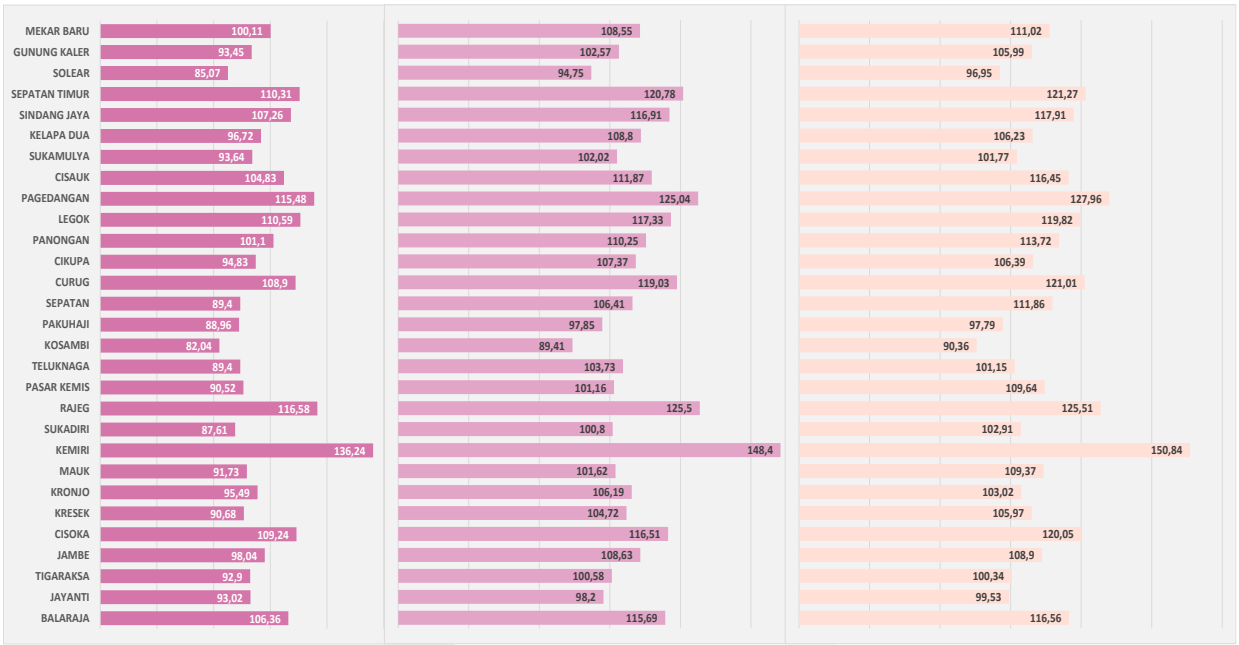
Gambar 3.1 Tingkat Partisipasi PAUD Sederajat (APK PAUD) Usia 5-6 Tahun Kabupaten Tangerang

Dari Gambar 3.1 dapat diketahui bahwa APK PAUD Kabupaten Tangerang Tahun 2024 sebesar 48,30 persen. Dari angka ini dapat diketahui bahwa masih ada setengah penduduk Tangerang usia 5-6 tahun yang belum bersekolah dalam rangka persiapan pra-SD. Kecamatan yang penduduknya paling banyak bersekolah untuk persiapan pra-SD adalah Kec. Sepatan sebesar 72,9 persen. Sedangkan paling kecil pada Kec. Kemiri sebesar 26,47 persen.



Gambar 3.2 Tingkat Partisipasi SD Sederajat Kabupaten Tangerang

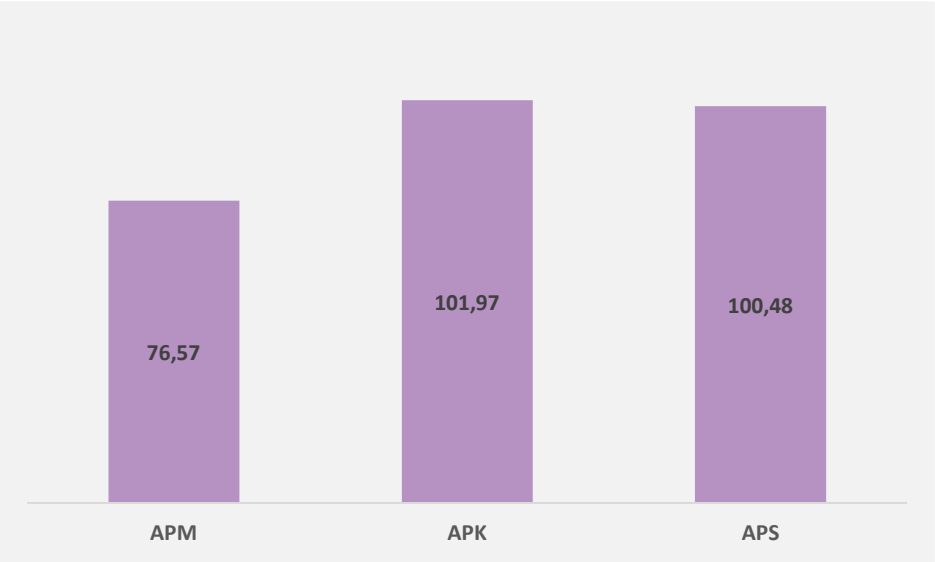
Berdasarkan Gambar 3.2 dapat diketahui bahwa capaian APM, APK, dan APS SD sederajat Kabupaten Tangerang Tahun 2024 melebihi 100 persen. Hal ini menunjukkan ada sebagian peserta didik SD sederajat di Kabupaten Tangerang yang bukan penduduk/tidak ber-NIK Kabupaten Tangerang. Berikut rincian capaian ketiga indikator pada masing-masing kecamatan.



(a) APM (b) APK (c) APS

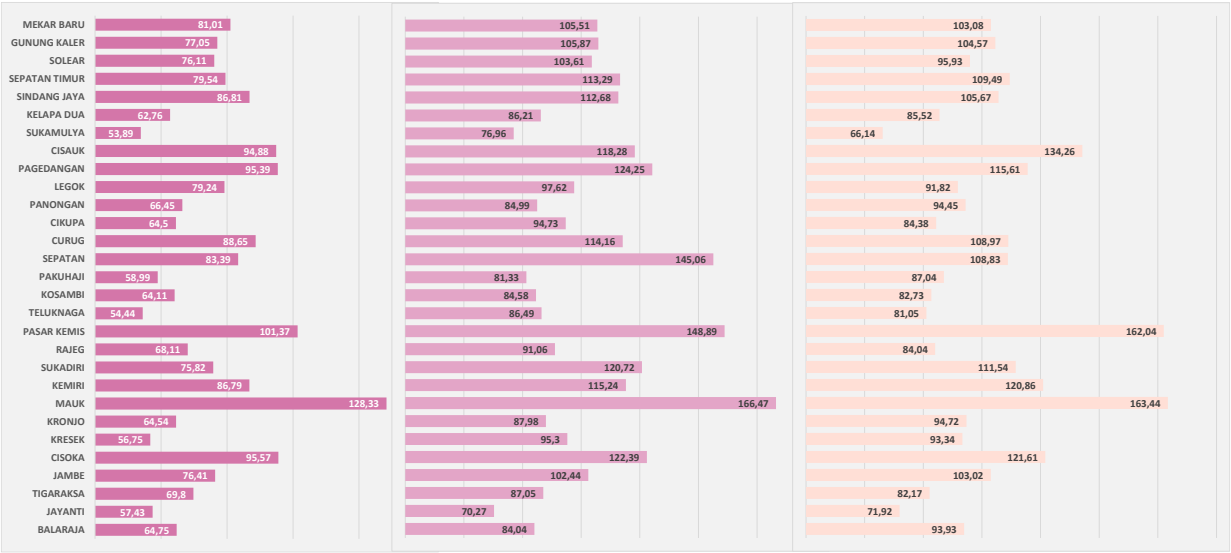
Gambar 3.3 Tingkat Partisipasi SD Sederajat Kabupaten Tangerang per Kecamatan

Dari Gambar 3.3 dapat diketahui bahwa ada beberapa kecamatan yang capaian angka partisipasinya tinggi melebihi 100 persen, ada yang di bawah 100 persen. Kecamatan Kemiri memiliki capaian yang sangat tinggi, hal ini dimungkinkan terdapat warga yang bukan berasal dari Kecamatan Kemiri namun bersekolah di Kecamatan Kemiri. Sedangkan untuk kecamatan yang capaian angka partisipasinya di bawah 100 persen, dimungkinkan masih ada warga usia sekolah SD yang belum bersekolah atau bersekolah di kecamatan lain. Ada kecamatan yang APMnya kurang dari 100 persen, namun APKnya di atas 100 persen seperti Kecamatan Gunung Kaler dengan APK sebesar 102,57 persen. Artinya terdapat peserta didik SD sederajat yang di luar usia 7-12 tahun.



Gambar 3.4 Tingkat Partisipasi SMP Sederajat Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Gambar 3.4 dapat diketahui bahwa capaian APM, APK, dan APS SMP sederajat Kabupaten Tangerang Tahun 2024 melebihi 100 persen pada indikator APK dan APS. Sedangkan pada indikator APM masih di bawah 100 persen yaitu sebesar 76,57 persen. Hal ini menunjukkan ada sebagian peserta didik SMP sederajat di Kabupaten Tangerang yang usianya di luar usia SMP (13-15 tahun) atau sebesar sekitar 25 persen yang usianya di luar 13-15 tahun. Berikut rincian capaian ketiga indikator pada masing-masing kecamatan.



(a) APM (b) APK (c)APS

Gambar 3.5 Tingkat Partisipasi SMP Sederajat Kabupaten Tangerang per Kecamatan

Dari grafik dapat diketahui bahwa ada beberapa kecamatan yang capaian angka partisipasinya tinggi melebihi 100 persen, ada yang di bawah 100 persen. Kecamatan Mauk dan Kecamatan Pasar Kemis memiliki capaian APM di atas 100 persen, hal ini dimungkinkan terdapat penduduk yang bukan berasal dari kecamatan tersebut yang bersekolah di Kecamatan Mauk dan Kecamatan Pasar Kemis.

3.2 Data Pokok Pendidikan Dasar

1. Data Satuan Pendidikan

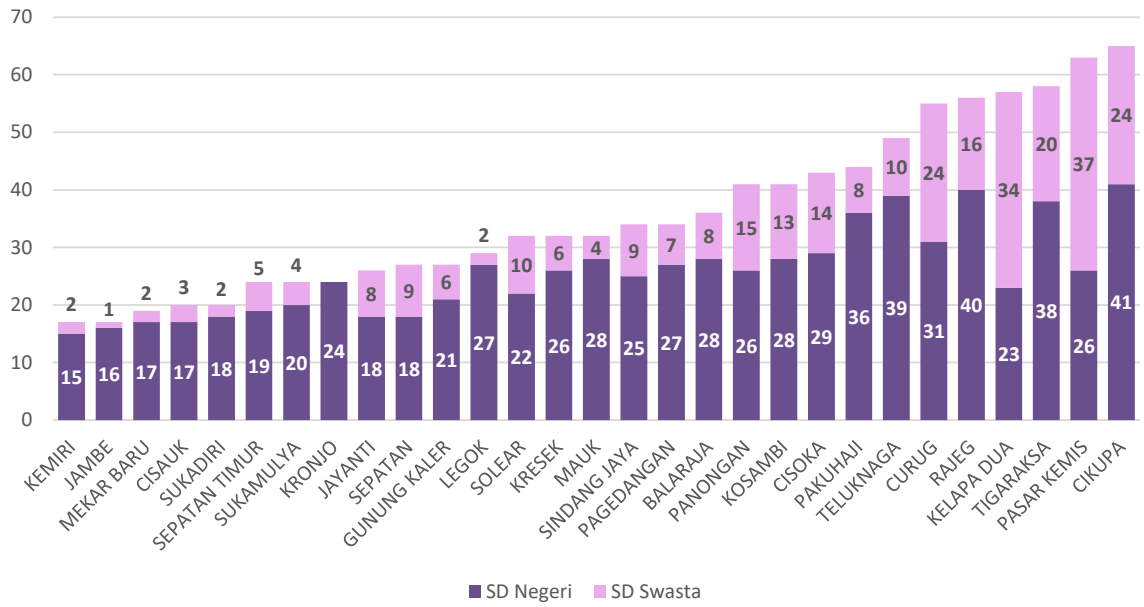
Pada Permendikbud Nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada dinas daerah kabupaten atau kota yang menyelenggarakan urusan pendidikan. Berarti dalam hal ini, kabupaten Tangerang menaungi jenjang pendidikan dasar yang berada di lingkup wilayah kabupaten Tangerang yaitu tingkat SD dan tingkat SMP. Berikut merupakan jumlah satuan pendidikan yang berada di wilayah kabupaten Tangerang.

Untuk data satuan pendidikan, peserta didik, PTK maupun variabel lainnya yang dijabarkan merupakan data dari Dapodik saja tidak termasuk madrasah.

Tabel 3.1 Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Status

Status Satuan Pendidikan	SD	SMP	Total
Negeri	743	95	838
Swasta	303	392	695
Total	**1.046**	**487**	**1.533**

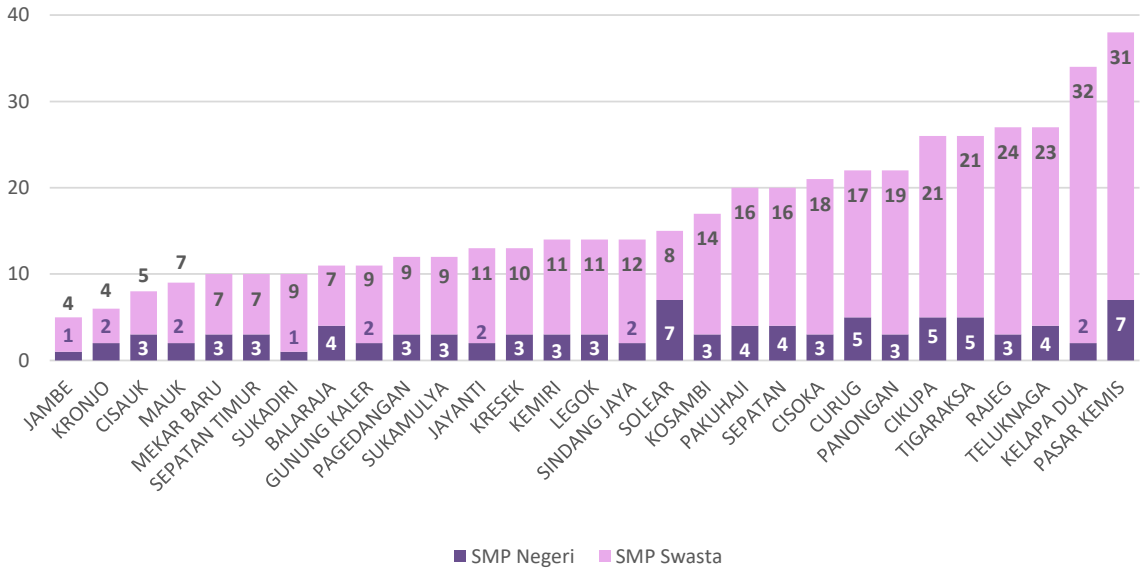
Berdasarkan Tabel 3.1, dapat terlihat bahwa total satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di bawah naungan Kemendikbudristek pada Kabupaten Tangerang berjumlah 1.533 sekolah yang terdiri atas 1.046 SD dan 487 SMP. Pada jenjang SD dapat terlihat jumlah satuan pendidikan negeri lebih banyak daripada swasta dengan jumlah satuan pendidikan negeri sebanyak 743 dan satuan pendidikan swasta sebanyak 303. Sedangkan, pada jenjang SMP satuan pendidikan swasta lebih banyak dengan total 392 satuan pendidikan, dibandingkan satuan pendidikan negeri yang hanya berjumlah 95 satuan pendidikan.



Gambar 3.6 Sebaran SD Berdasarkan Status Satuan Pendidikan per Kecamatan

Gambar 3.6 menunjukkan sebaran SD di Kabupaten Tangerang berdasarkan status satuan pendidikan per kecamatan. Dapat terlihat, jumlah SD terbanyak terdapat pada kecamatan Cikupa dengan 41 SD negeri dan 24 SD swasta.

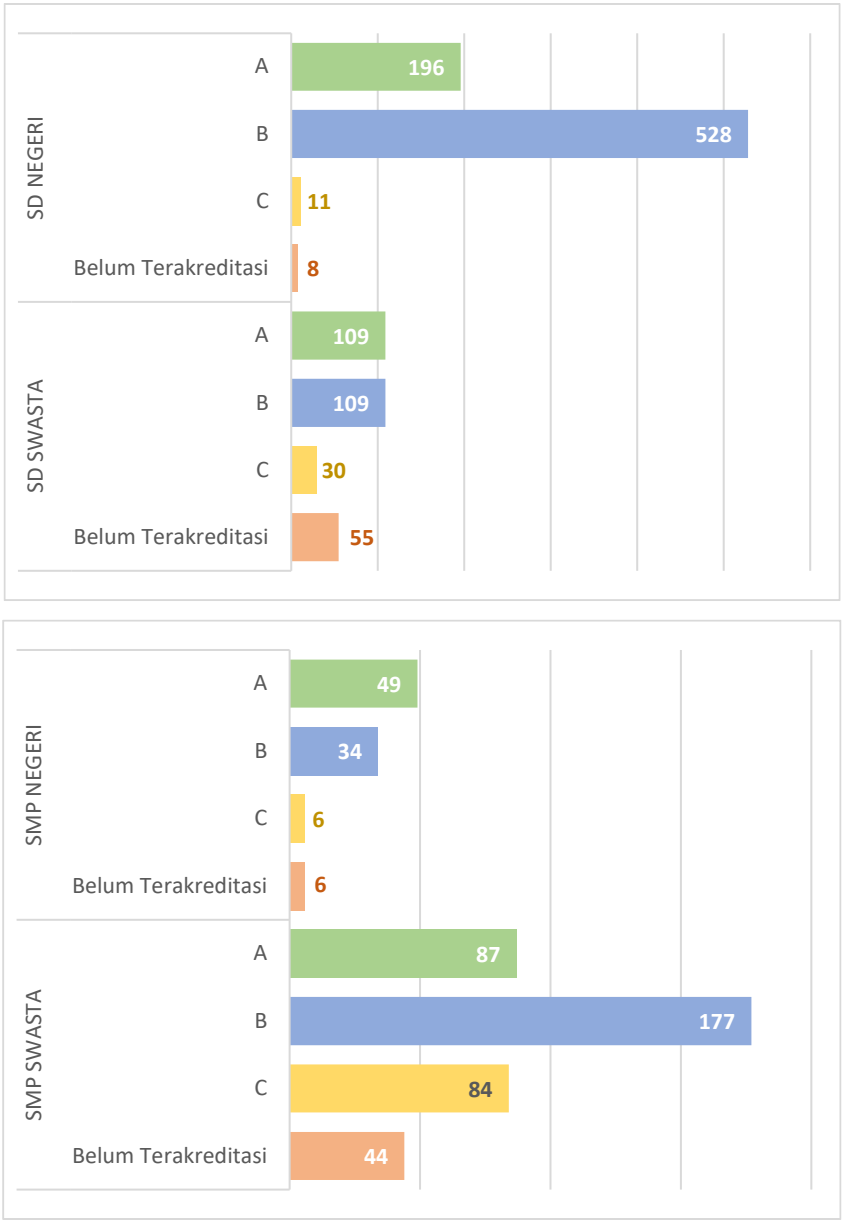
Sedangkan jumlah SD paling sedikit terdapat pada kecamatan Kemiri dan Jambe dengan 15 SD negeri dan 2 SD swasta pada kecamatan Kemiri, dan 16 SD negeri dan 1 SD swasta pada kecamatan Jambe. Hampir pada seluruh kecamatan, jumlah satuan pendidikan SD negeri selalu lebih besar dibandingkan satuan pendidikan SD swasta, kecuali pada Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Pasar Kemis.



Gambar 3.7 Sebaran SMP Berdasarkan Status Satuan Pendidikan per Kecamatan

Pada tingkat SMP, sebaran satuan pendidikan paling banyak terdapat pada Kecamatan Pasar Kemis dengan 7 SMP negeri dan 31 SMP swasta. Sedangkan jumlah satuan pendidikan paling sedikit terdapat pada Kecamatan Jambe dengan 1 SMP negeri dan 4 SMP swasta. Berbeda dengan tingkat SD, pada tingkat SMP jumlah satuan pendidikan swasta selalu lebih banyak dibandingkan jumlah satuan pendidikan negeri.

Gambar 3.8 menunjukkan jumlah satuan pendidikan berdasarkan status dan akreditasi. Pada tingkat SD, kebanyakan satuan pendidikan memiliki akreditasi B baik untuk satuan pendidikan negeri maupun swasta. Kemudian pada tingkat SMP, terdapat perbedaan pada satuan pendidikan negeri dan swasta. Pada satuan pendidikan swasta paling banyak memiliki akreditasi B, namun pada satuan pendidikan negeri lebih banyak yang memiliki akreditasi A.



Gambar 3.8 Jumlah Satuan Pendidikan Berdasarkan Akreditasi

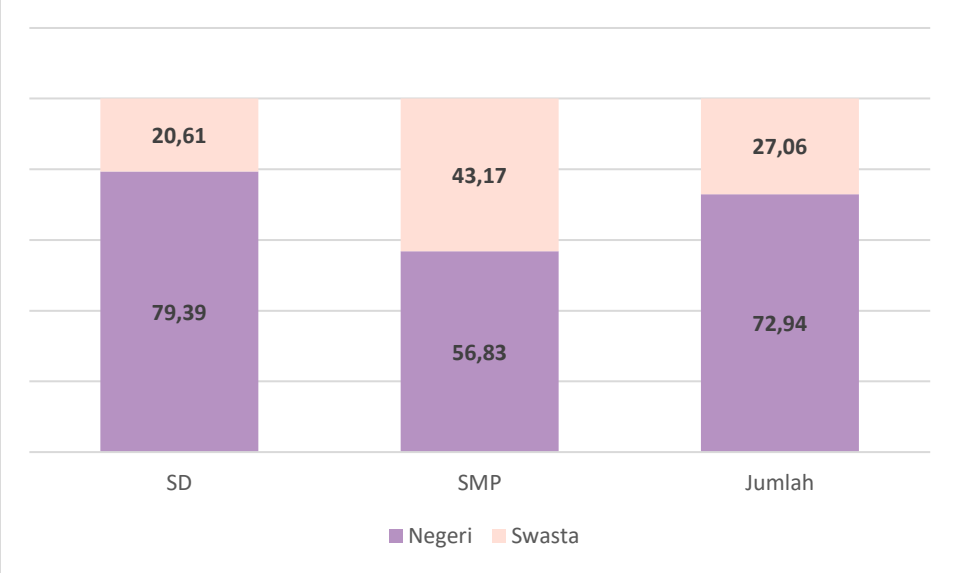
2. Data Sumber Daya Manusia

a. Peserta Didik

Peserta didik atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan sumber data dari DAPODIK, jumlah peserta didik pada jenjang SD dan SMP pada satuan pendidikan negeri dan swasta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Peserta Didik Berdasarkan Jenjang

Status Satuan Pendidikan	SD	SMP	Jumlah
Negeri	271.770	77.856	349.626
Swasta	70.539	59.152	129.691
Total Peserta Didik	342.309	137.008	479.317



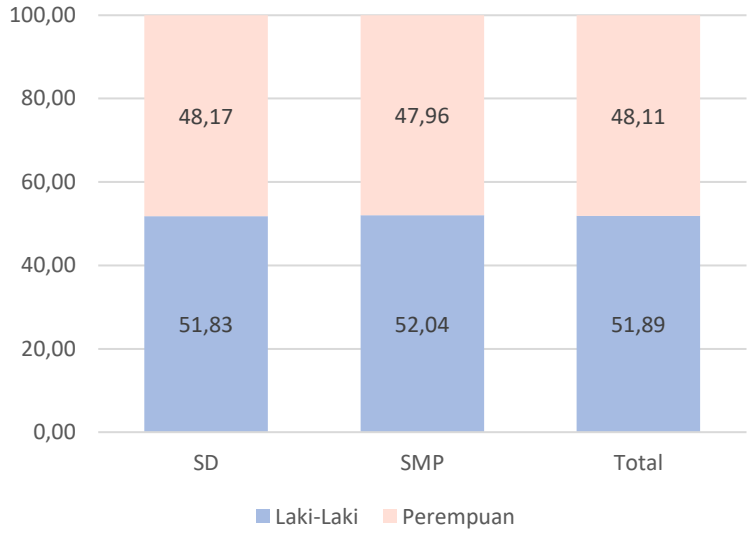
Gambar 3.9 Persentase Peserta Didik Berdasarkan Status Satuan Pendidikan

Berdasarkan Tabel 3.2 dan Gambar 3.9 dapat diperoleh informasi bahwa jumlah peserta didik SD dan SMP di Kabupaten Tangerang yaitu berjumlah 479.317 peserta didik. Jumlah peserta didik SD yaitu 342.309 peserta didik dengan 271.770 (79,39%) merupakan peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan 70.539 (20,61%) merupakan peserta didik pada satuan pendidikan swasta.

Kemudian jumlah peserta didik SMP yaitu berjumlah 137.008 peserta didik dengan 77.856 (56,83%) merupakan peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan 59.152 (43,17%) peserta didik merupakan peserta didik pada satuan pendidikan swasta. Secara keseluruhan, jumlah peserta didik pada satuan pendidikan negeri yaitu 349.626 peserta didik atau 72,94% dan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan swasta yaitu 129.691 peserta didik atau 27,06%.

Tabel 3.3 Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin

Status Satuan Pendidikan	SD	SMP	Jumlah
Laki-Laki	177.418	71.298	248.716
Perempuan	164.891	65.710	230.601
Total Peserta Didik	342.309	137.008	479.317



Gambar 3.10 Persentase Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 3.3 dan Gambar 3.10 dapat diperoleh informasi jumlah peserta didik SD dan SMP di Kabupaten Tengerang berdasarkan jenis kelamin. Pada jenjang SD, jumlah peserta didik laki-laki yaitu 177.418 (51,83%), sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah peserta didik perempuan yaitu 164.891 (48,17%). Kemudian pada jenjang SMP, jumlah peserta didik laki-laki yaitu 71.298 (52,04%), juga sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah peserta didik perempuan yaitu 65.710 (47,96%). Data peserta didik berdasarkan tingkatan kelas dan rombongan belajar pada jenjang SD dan SMP disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.4 Peserta Didik dan Rombongan Belajar (Rombel) SD

Tingkat	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombel	Rasio Peserta Didik per Rombel
Tingkat 1	62.689	2.169	29
Tingkat 2	60.086	2.086	29
Tingkat 3	59.716	2.035	30
Tingkat 4	52.682	1.855	29
Tingkat 5	54.326	1.884	29
Tingkat 6	52.810	1.843	29
Total	342.309	11.872	29

Tabel 3.4 menampilkan jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar (rombel), dan rasio peserta didik per rombel pada jenjang SD. Jumlah peserta didik terbanyak terdapat pada Kelas 1 yaitu 62.689 peserta didik dan jumlah peserta didik terkecil terdapat pada Kelas 4 yaitu 52.682 peserta didik. Jumlah seluruh rombel SD yaitu sebanyak 11.5872, sehingga secara umum rasio peserta didik per rombel adalah 29. Artinya, pada jenjang SD rata-rata jumlah peserta didik dalam 1 rombongan belajar adalah sebanyak 29 peserta didik.

Tabel.3.5 Peserta Didik dan Rombongan Belajar (Rombel) SMP

Tingkat	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Rombel	Rasio Peserta Didik per Rombel
Tingkat 7	46.764	1.455	33
Tingkat 8	45.811	1.400	33
Tingkat 9	44.433	1.370	33
Total	137.008	4.225	33

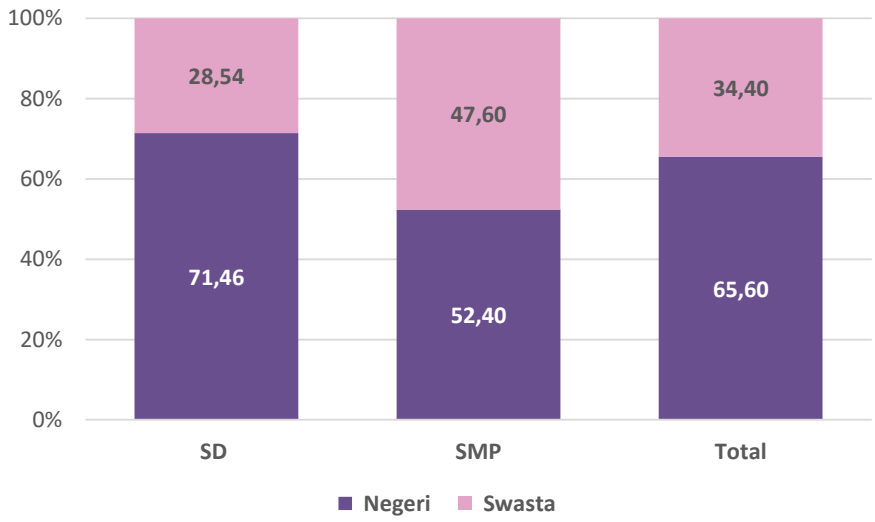
Tabel 3.5 menampilkan jumlah peserta didik, jumlah rombongan belajar (rombel), dan rasio peserta didik per rombel pada jenjang SMP. Jumlah peserta didik terbanyak terdapat pada Kelas 7 yaitu 46.764 peserta didik dan jumlah peserta didik terkecil terdapat pada Kelas 9 yaitu 44.433 peserta didik. Jumlah seluruh rombel SMP yaitu sebanyak 4.225, sehingga secara umum rasio peserta didik per rombel adalah 33. Artinya, pada jenjang SMP rata-rata jumlah peserta didik dalam 1 rombongan belajar adalah sebanyak 33 peserta didik.

b. Pendidik

Pendidik atau guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (UU No 14 Tahun 2005, pasal 8). Data pendidik jenjang yang berada di kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6 Jumlah Pendidik berdasarkan Status Satuan Pendidikan

Status Satuan Pendidikan	SD	SMP	Total
Negeri	9.340	3.043	12.383
Swasta	3.730	2.764	6.494
Total Pendidik	**13.070**	**5.807**	**18.877**



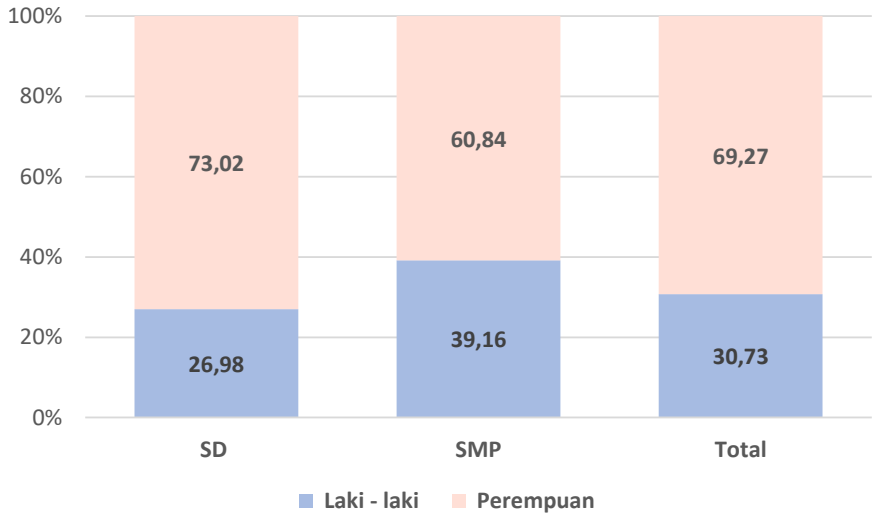
Gambar 3.11 Persentase Pendidik Berdasarkan Status Satuan Pendidikan

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat terlihat bahwa total pendidik jenjang pendidikan dasar pada Kabupaten Tangerang berjumlah 18.877 pendidik yang terdiri atas 13.070 pendidik SD dan 5.807 pendidik SMP.

Pada SD jumlah pendidik satuan pendidikan negeri lebih banyak daripada pendidik di satuan pendidikan swasta, dengan jumlah pendidik di satuan pendidikan negeri sebesar 9.340 pendidik dan swasta 3.730 pendidik. Hal yang sama juga terjadi pada SMP namun dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh, jumah pendidik satuan pendidik negeri sedikit lebih banyak yaitu 3.043 pendidik sementara jumlah pendidik di satuan pendidikan swasta berjumlah 2.764 pendidik.

Tabel 3.7 Jumlah Pendidik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	SD	SMP	Total
Laki - laki	3.526	2.274	5.800
Perempuan	9.544	3.533	13.077
Total Pendidik	**13.070**	**5.807**	**18.877**



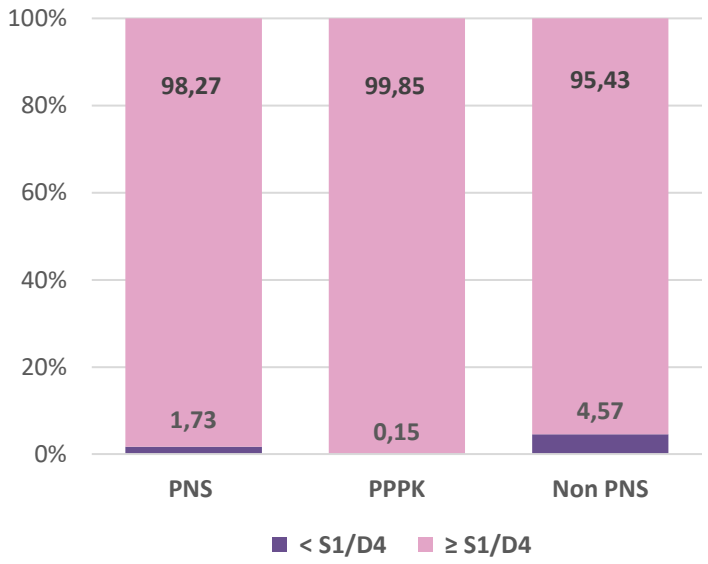
Gambar 3.12 Persentase Pendidik Berdasarkan Jenis Kelamin

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, baik pada tingkat SD maupun SMP jumlah pendidik perempuan selalu lebih banyak dibandingkan dengan pendidik laki-laki. Pada tingkat SD, persentase pendidik perempuan 73,02% dibandingkan dengan total pendidik. Begitu pula pada tingkat SMP, namun dengan persentase yang sedikit lebih kecil yaitu persentase pendidik perempuan sebesar 60,84% dibandingkan dengan total pendidik.

Tabel 3.8 Jumlah Pendidik SD Berdasarkan Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	Negeri			Swasta			Total
	PNS	PPPK	Non PNS	PNS	PPPK	Non PNS	
< S1/D4	48	5	59	-	-	261	373
≥ S1/D4	2.733	3.285	3.210	-	-	3.469	12.697
Total Pendidik	**2.781**	**3.290**	**3.269**	**-**	**-**	**3.730**	**13.070**

Tabel 3.8 menampilkan data pendidik SD berdasarkan kualifikasi pendidikan, status kepegawaian, dan status satuan pendidikan. Berdasarkan status kepegawaian, pada SD Negeri jumlah pendidik PPPK paling banyak yaitu sejumlah 3.290 pendidik, diikuti dengan pendidik Non PNS sejumlah 3.269 pendidik, dan untuk pendidik PNS masih lebih kecil jumlahnya yaitu sejumlah 2.781. Jika melihat kualifikasi pendidikan, secara keseluruhan hampir seluruh pendidik pada SD Negeri sudah memiliki ijazah S1, namun masih terdapat 112 pendidik yang belum memiliki ijazah S1. Kemudian pada SD Swasta, seluruh pendidik merupakan pendidik Non PNS, dengan 261 pendidik masih belum memiliki ijazah S1.

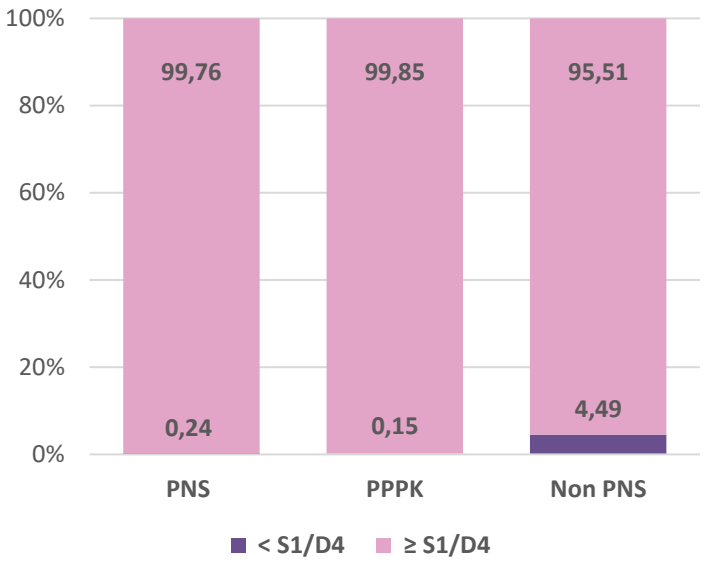


Gambar 3.13 Persentase Pendidik SD Berdasarkan Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 3.9 Jumlah Pendidik SMP Berdasarkan Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	Status Kepegawaian			Swasta			Total
	PNS	PPPK	Non PNS	PNS	PPPK	Non PNS	
< S1/D4	2	2	10	-	-	152	166
≥ S1/D4	847	1.344	838	2	1	2.609	5.641
Total Pendidik	**849**	**1.346**	**848**	**2**	**1**	**2.761**	**5.807**

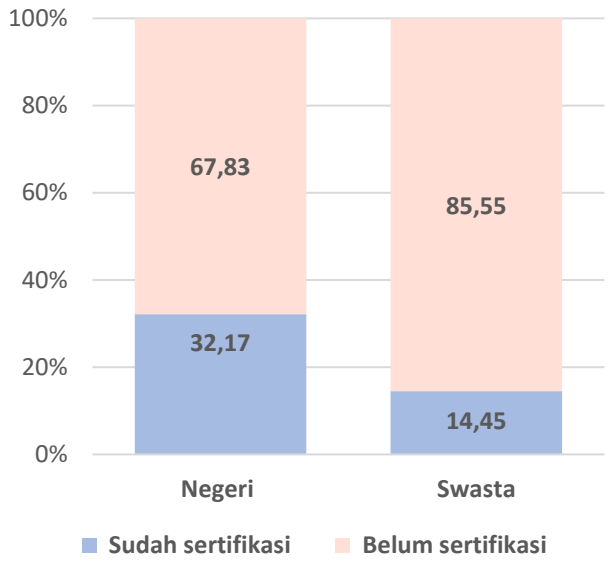
Pada tingkat SMP, dapat terlihat bahwa pada SMP negeri jumlah pendidik PPPK paling banyak yaitu sejumlah 1.346 pendidik, sementara jumlah pendidik PNS dan Non PNS nya hampir sama yaitu 849 pendidik PNS dan 848 pendidik Non PNS. Jika melihat kualifikasi pendidikan hampir seluruh pendidik pada SMP negeri sudah memiliki ijazah S1, namun masih terdapat 14 pendidik yang belum memiliki ijazah S1. Kemudian pada SMP swasta, terdapat 2 pendidik PNS dan 1 pendidik PPPK, selebihnya merupakan pendidik Non PNS yaitu sejumlah 2.761 pendidik. Pada SMP swasta terdapat 152 pendidik yang belum memiliki ijazah S1.



Gambar 3.14 Persentase Pendidik SMP berdasarkan Status Kepegawaian dan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 3.10 Jumlah Pendidik SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Status Sertifikasi	Status Satuan Pendidikan		Total
	Negeri	Swasta	
Sudah sertifikasi	3.005	539	3.544
Belum sertifikasi	6.335	3.191	9.526
Total Pendidik	**9.340**	**3.730**	**13.070**

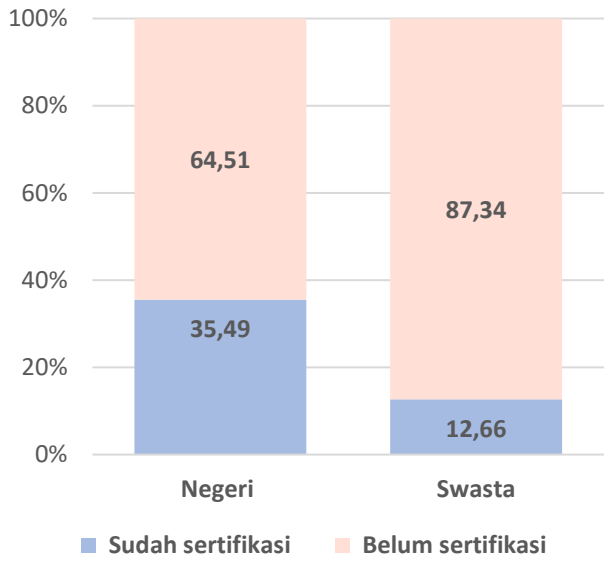


Gambar 3.15 Persentase Pendidik SD Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Berdasarkan status sertifikasi, terdapat 3.544 pendidik yang sudah sertifikasi dari total 13.070 pendidik SD. Hal ini berarti, masih cukup banyak pendidik yang belum mendapatkan sertifikasi. Jika dilihat berdasarkan status satuan pendidikan, persentase pendidik SD negeri yang memiliki sertifikasi lebih tinggi dibandingkan pendidik SD swasta. Di mana terdapat 32,17% pendidik SD negeri yang sudah sertifikasi, sedangkan pada satuan pendidikan swasta hanya terdapat 14,45% pendidik yang sudah sertifikasi.

Tabel 3.11 Jumlah Pendidik SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Status Sertifikasi	Status Satuan Pendidikan		Total
	Negeri	Swasta	
Sudah sertifikasi	1.080	350	1.430
Belum sertifikasi	1.963	2.414	4.377
Total Pendidik	**3.043**	**2.764**	**5.807**



Gambar 3.16 Persentase Pendidik SMP Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

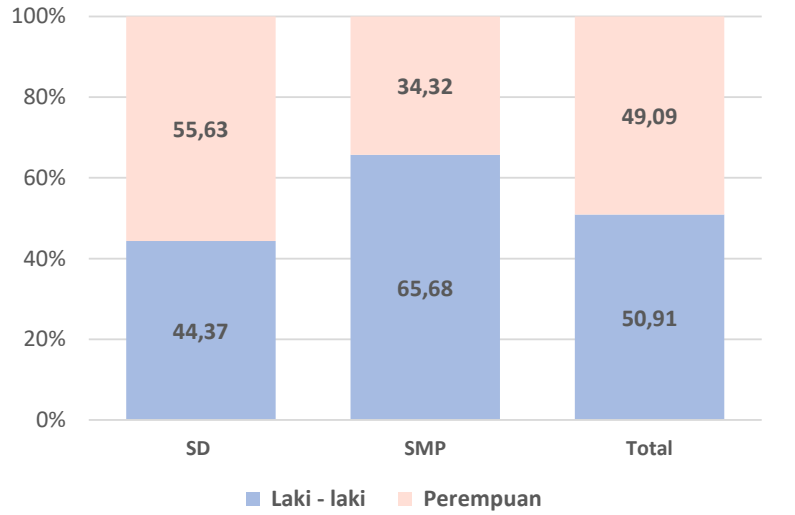
Pada tingkat SMP, terdapat 1.430 pendidik yang sudah sertifikasi dari total 5.807 pendidik. Jika dilihat berdasarkan status satuan pendidikan, persentase pendidik SMP negeri yang memiliki sertifikasi lebih tinggi dibandingkan pendidik SMP swasta. Di mana terdapat 35,49% pendidik SMP negeri yang sudah sertifikasi, sedangkan pada satuan pendidikan swasta hanya terdapat 12,66% pendidik yang sudah sertifikasi.

c. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berasarkan pada DAPODIK, data Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP negeri maupun swasta disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.12 Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	SD	SMP	Total
Laki - laki	406	266	672
Perempuan	509	139	648
Total Kepala Sekolah	**915**	**405**	**1.320**

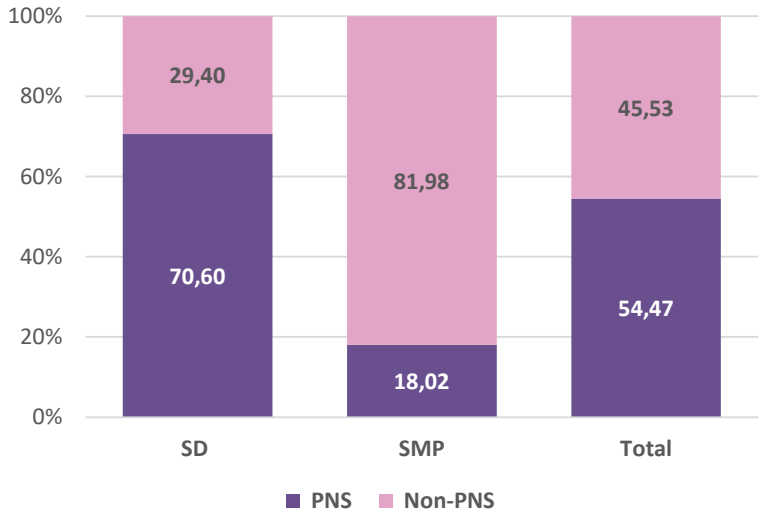


Gambar 3.17 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Tabel 3.12 dan Gambar 3.17 dapat diperoleh informasi jumlah Kepala Sekolah (KS) berdasarkan jenis kelamin pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tangerang. Pada jenjang SD, jumlah KS laki-laki yaitu 406 (44,37%) lebih sedikit dibandingkan dengan KS Perempuan yaitu 509 (55,63%). Berbeda dengan jenjang SD, pada jenjang SMP jumlah KS laki-laki yaitu 266 (65,68%) lebih banyak dibandingkan dengan KS perempuan yaitu 139 (34,32%). Secara keseluruhan, KS laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan KS perempuan.

Tabel 3.13 Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	SD		Total	SMP		Total
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
PNS	644	2	646	70	3	73
Non-PNS	-	269	269	-	332	332
Total Kepala Sekolah	**644**	**271**	**915**	**70**	**335**	**405**

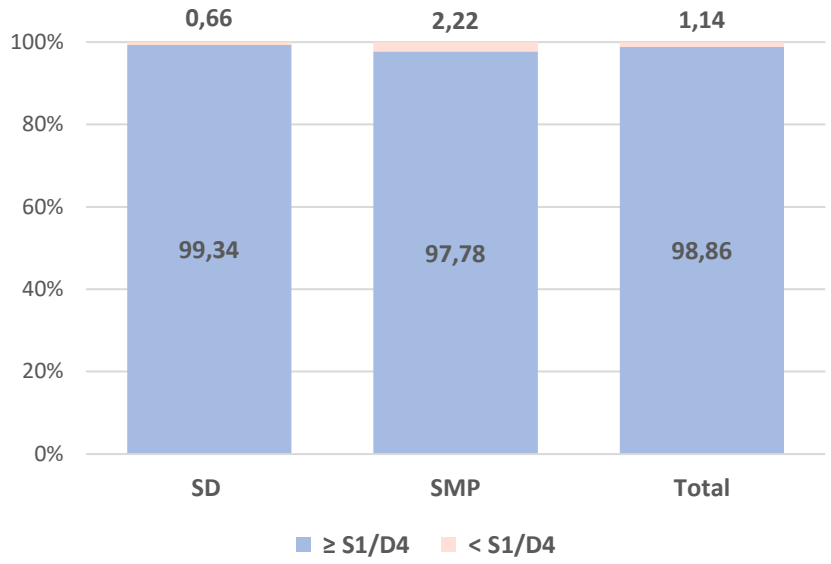


Gambar 3.18 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan Tabel 3.13 dan Gambar 3.18 dapat diperoleh informasi Kepala Sekolah berdasarkan status kepegawaian pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tangerang. Pada jenjang SD, jumlah KS PNS yaitu 646 (70,60%) lebih banyak dibandingkan KS Non-PNS yaitu 269 (29,40%). Sementara pada jenjang SMP, KS PNS yaitu 73 (18,02%) lebih sedikit dibandingkan dengan KS Non-PNS yaitu 332 (81,98%), hal ini tentu bersesuaian dengan komposisi status SMP di Kabupaten Tangerang, dimana kondisinya satuan pendidikan negeri lebih sedikit dibandingkan satuan pendidikan swasta. Kemudian baik pada jenjang SD dan SMP, seluruh KS pada satuan pendidikan negeri sudah berstatus PNS.

Tabel 3.14 Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	SD		Total	SMP		Total
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
< S1/D4	-	6	6	-	9	9
≥ S1/D4	644	265	909	70	326	396
Total Kepala Sekolah	**644**	**271**	**915**	**70**	**335**	**405**

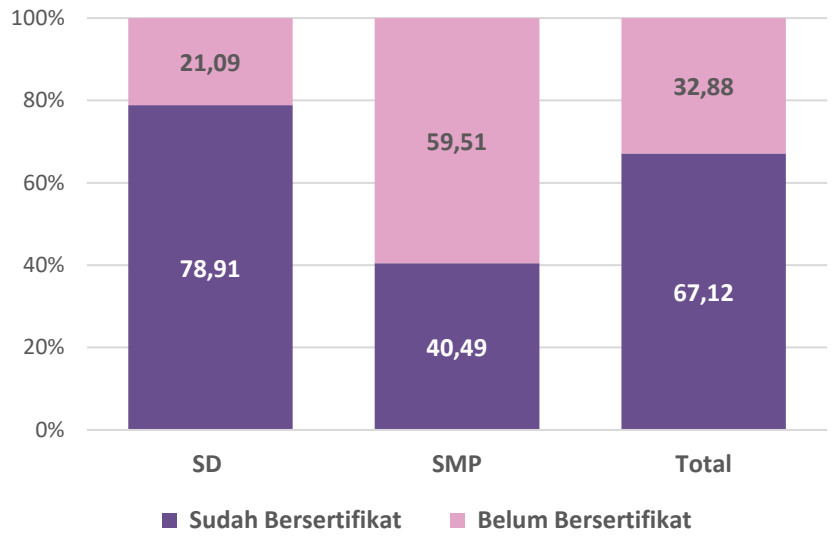


Gambar 3.19 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Berdasarkan Tabel 3.14 dan Gambar 3.19 dapat diperoleh informasi Kepala Sekolah berdasarkan kualifikasi pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tangerang. Pada jenjang SD, 909 (99,34%) KS sudah berkualifikasi minimal S1/D4, artinya masih ada 6 (0,66%) KS SD yang belum S1/D4. Kemudian pada jenjang SMP, 396 (97,78%) KS sudah berkualifikasi minimal S1/D4, artinya masih ada 9 (2,22%) KS SMP yang belum S1/D4. Secara keseluruhan pada jenjang SD dan SMP, KS yang sudah berkualifikasi S1/D4 yaitu sebesar 98,86%.

Tabel 3.15 Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Sertifikasi Pendidik	SD		Total	SMP		Total
	Negeri	Swasta		Negeri	Swasta	
Sudah Bersertifikat	638	84	722	64	100	164
Belum Bersertifikat	6	187	193	6	235	241
Total Kepala Sekolah	**644**	**271**	**915**	**70**	**335**	**405**



Gambar 3.20 Persentase Kepala Sekolah Berdasarkan Sertifikasi Pendidik

Berdasarkan Tabel 3.15 dan Gambar 3.20 dapat diperoleh informasi Kepala Sekolah berdasarkan sertifikasi pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tangerang. Pada jenjang SD, dari 915 KS, 722 (78,91%) diantaranya sudah bersertifikat. Sementara pada jenjang SMP, dari 405 KS, 164 (40,49%) diantaranya sudah bersertifikat. Secara keseluruhan, 67,12% KS jenjang SD dan SMP di Kabupaten Tangerang sudah bersertifikat pendidik.

d. Pengawas Sekolah dan Penilik

Tugas Pokok Pengawas yaitu melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) SNP, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Tabel 3.16 Pengawas Sekolah jenjang SD dan SMP

Pengawas Sekolah	Jumlah	Gugus	Sekolah
SD	27	91	1.046
SMP	32	10	487
Jumlah	59	101	1.533

Berdasarkan Tabel 3.16, di Kabupaten Tangerang terdapat 59 pengawas. Pada SD terdapat sejumlah 27 pengawas, sementara SMP terdapat sejumlah 32 pengawas. Artinya, pada SD rata-rata satu pengawas mengawasi 38 sekolah, sementara pada SMP rata-rata satu pengawas mengawasi 14 sekolah.

Sedangkan Penilik adalah tenaga kependidikan yang bertugas melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan. Penilik juga dapat diartikan sebagai orang yang menilik atau mengawasi. Penilik Paud Dikmas adalah PNS yang bertugas melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat (Dikmas), dan kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Penilik Paud Dikmas berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Di Kabupaten Tangerang ada 40 penilik.

e. Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan. Berdasarkan DAPODIK, berikut data tenaga penunjang kependidikan jenjang SD dan SMP.

Tabel 3.17 Tenaga Penunjang Kependidikan SD

Tenaga Kependidikan	Status Satuan Pendidikan		Total
	Negeri	Swasta	
Laboran	-	1	1
Penjaga Sekolah	464	24	488
Pesuruh/Office Boy	23	30	53
Petugas Keamanan	12	9	21
Tenaga Administrasi Sekolah	469	269	738
Tenaga Perpustakaan	53	20	73
Total	**1.021**	**353**	**1.374**

Tabel 3.18 Tenaga Penunjang Kependidikan SMP

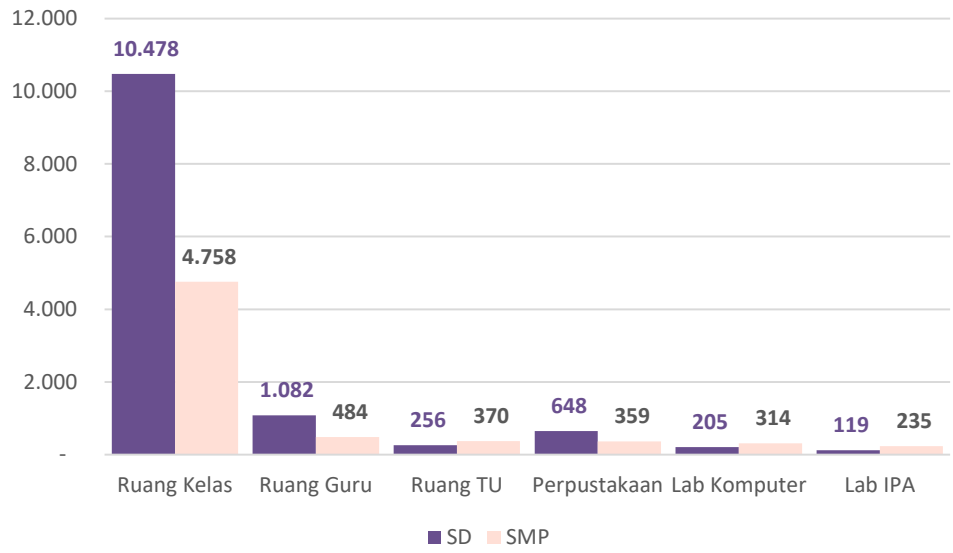
Tenaga Kependidikan	Status Satuan Pendidikan		Total
	Negeri	Swasta	
Laboran	-	5	5
Penjaga Sekolah	121	21	142
Pesuruh/Office Boy	74	21	95
Petugas Keamanan	44	14	58
Tenaga Administrasi Sekolah	361	279	640
Tenaga Perpustakaan	22	13	35
Total	**622**	**353**	**975**

f. Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat penting bagi terciptanya proses pembelajaran karena merupakan pendukung keamanan dan kenyamanan dalam belajar. Berikut merupakan data komponen sarana prasarana SD dan SMP berdasarkan inputan satuan pendidikan pada Dapodik:

Tabel 3.19 Jumlah Sarana Prasarana berdasarkan Jenis Sarana

Sarana Prasarana	SD		SMP		Total
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
Ruang Kelas	7.189	3.289	2.048	2.710	15.236
Ruang Guru	755	327	93	391	1.566
Ruang TU	94	162	87	283	626
Perpustakaan	435	213	80	279	1.007
Lab Komputer	55	150	55	259	519
Lab IPA	24	95	75	160	354



Gambar 3.21 Jumlah Sarana Prasarana berdasarkan Jenis

Berdasarkan Gambar 3.21, dapat terlihat jumlah ruang kelas, ruang guru, dan perpustakaan lebih banyak pada SD daripada SMP, karena jumlah satuan pendidikan dan rombongan belajar pada SD memang lebih besar daripada SMP. Sedangkan, jumlah ruang TU, Laboratorium Komputer, dan Laboratorium IPA lebih besar pada tingkat SMP daripada SD. Hal ini mungkin disebabkan, karena kebutuhan laboratorium Komputer dan IPA untuk pembelajaran lebih besar pada tingkat SMP.

Tabel 3.20 Kepemilikan Toilet SD

Kepemilikan Toilet	Memiliki		Tidak Memiliki
	Terpisah	Bersama	
Pendidik	412	294	340
Peserta Didik	853	120	73

Tabel 3.20 menjelaskan kepemilikan toilet di tingkat SD. Dapat terlihat bahwa untuk toilet pendidik, terdapat 412 satuan pendidikan yang sudah memiliki toilet terpisah, berarti terdapat minimal satu toilet untuk pendidik laki-laki dan satu toilet untuk pendidik perempuan. Kemudian, sebanyak 294 satuan pendidikan memiliki toilet pendidik bersama. Sedangkan, masih terdapat 340 satuan pendidikan yang tidak memiliki toilet pendidik sama sekali. Kemudian untuk toilet peserta didik, sebagian besar satuan pendidikan sudah memiliki toilet peserta didik namun masih terdapat 73 satuan pendidikan yang tidak memiliki toilet peserta didik. Di antara satuan pendidikan yang sudah memiliki toilet peserta didik, 853 satuan pendidikan sudah memiliki toilet terpisah berdasarkan jenis kelamin dan 120 lainnya masih memiliki toilet bersama.

Tabel 3.21 Kepemilikan Toilet SMP

Kepemilikan Toilet	Memiliki		Tidak Memiliki
	Terpisah	Bersama	
Pendidik	258	92	137
Peserta Didik	386	44	57

Pada tingkat SMP, dapat terlihat untuk toilet pendidik terdapat 350 satuan pendidikan yang telah memiliki toilet dengan rincian 258 satuan pendidikan memiliki toilet terpisah berdasarkan jenis kelamin dan 92 lainnya tidak. Kemudian untuk toilet peserta didik, kebanyakan satuan pendidikan sudah memiliki toilet peserta didik

namun masih terdapat 57 satuan pendidikan yang tidak memiliki toilet peserta didik. Di antara satuan pendidikan yang sudah memiliki toilet peserta didik, 386 satuan pendidikan sudah memiliki toilet terpisah berdasarkan jenis kelamin dan 44 lainnya masih memiliki toilet bersama.

Tabel 3.22 Ketersediaan Sarana Prasarana SD dan SMP

Ketersediaan Sarpras	SD			SMP		
	Sudah Terpenuhi	Belum Terpenuhi	Persentase	Sudah Terpenuhi	Belum Terpenuhi	Persentase
Ruang Kelas	10.478	1.394	88,26	4.758	- 533	112,62
Ruang Guru	1.082	- 36	103,44	484	3	99,38
Ruang TU	256	790	24,47	370	117	75,98
Perpustakaan	648	398	61,95	359	128	73,72
Lab. Komputer	205	841	19,60	314	173	64,48
Lab. IPA	119	927	11,38	235	252	48,25

Kebutuhan ruang kelas dapat dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar. Pada tingkat SD, rombongan belajar berjumlah 11.872 dan ruang kelas berjumlah 10.478, yang berarti masih ada kekurangan sebesar 1.394 kelas atau baru 88,26 persen ruang kelas yang terpenuhi. Sedangkan pada tingkat SMP, jumlah ruang kelas lebih banyak daripada rombongan belajar, yaitu tersedia 4.758 ruang kelas untuk 4.225 rombongan belajar.

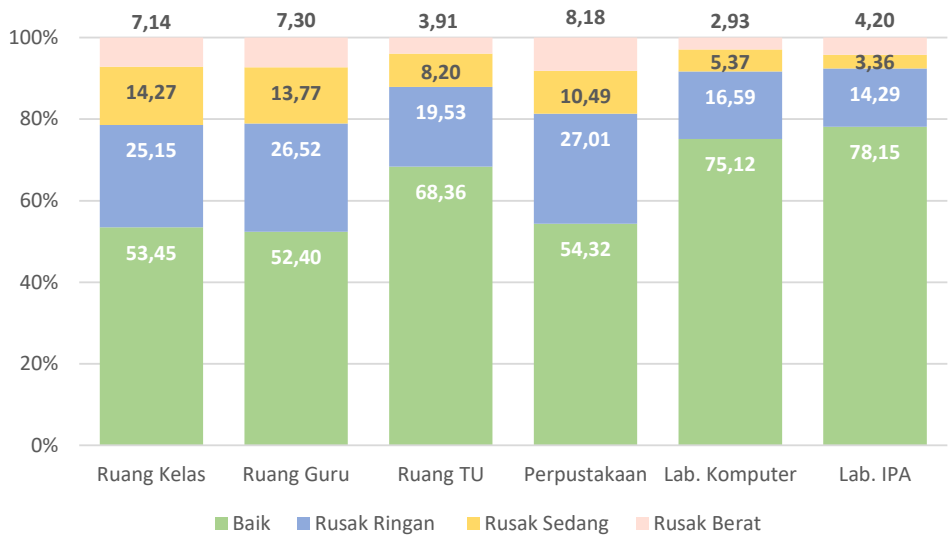
Kebutuhan ruang guru, ruang TU, perpustakaan, laboratorium komputer, dan laboratorium IPA dihitung berdasarkan asumsi bahwa setiap satuan pendidikan minimal memiliki satu ruang guru, ruang TU, perpustakaan, laboratorium komputer dan laboratorium IPA, sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.

Ketersediaan ruang guru baik pada SD maupun SMP sudah di atas 90% yang artinya sudah cukup banyak satuan pendidikan yang memiliki ruang guru, namun untuk ruang TU, hanya 24,47% SD dan 75,98% SMP yang memiliki ruang TU. Kemudian, ketersediaan perpustakan pada tingkat SD masih sebesar 61,95% sedangkan SMP sudah cukup tinggi yaitu 73,72% satuan pendidikan yang sudah memiliki perpustakaan. Untuk laboratorium, pada tingkat SD ketersediaannya masih cukup rendah yaitu 19,60% untuk Lab. Komputer dan 11,38% untuk Lab. IPA.

Lalu untuk tingkat SMP, ketersediaan Lab. Komputer sudah lebih dari setengah yang memiliki yaitu 64,48% satuan pendidikan dan 48,25% satuan pendidikan yang memiliki Lab. IPA.

Tabel 3.23 Jumlah Sarana Prasarana SD menurut Kondisi

Sarana Prasarana	Kondisi			
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Ruang Kelas	5.600	2.635	1.495	748
Ruang Guru	567	287	149	79
Ruang TU	175	50	21	10
Perpustakaan	352	175	68	53
Laboratorium Komputer	154	34	11	6
Laboratorium IPA	93	17	4	5

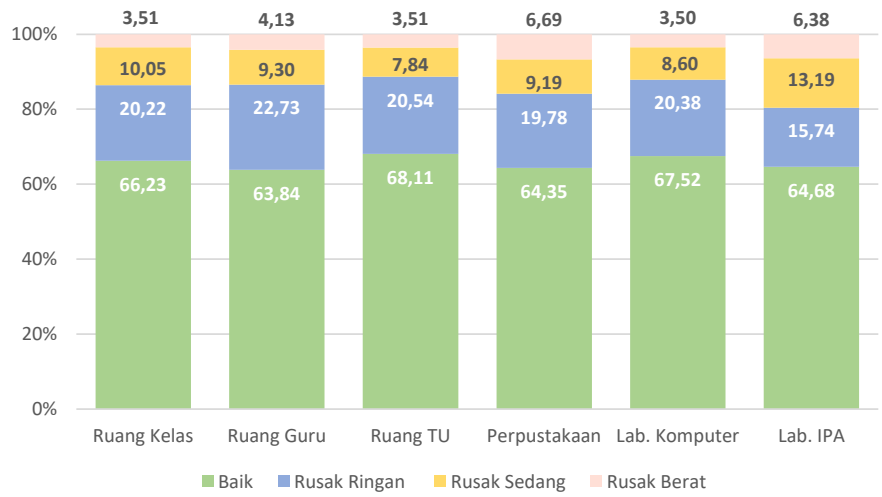


Gambar 3.22 Persentase Sarana Prasarana SD menurut Kondisi

Tabel dan grafik di atas menjelaskan bagaimana kondisi sarana prasarana yang terdapat di tingkat SD. Pada ruang kelas, ruang guru dan perpustakaan hanya sekitar 52% ruangan dengan kondisi baik, selebihnya memiliki tingkat kerusakan yang beragam. Kemudian untuk ruang TU terdapat 68,36% ruang dengan kondisi baik. Lalu pada laboratorium, baik IPA maupun komputer ruangan dengan kondisi baik sudah di atas 75%.

Tabel 3.24 Jumlah Sarana Prasarana SMP menurut Kondisi

Sarana Prasarana	Kondisi			
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Ruang Kelas	3.151	962	478	167
Ruang Guru	309	110	45	20
Ruang TU	252	76	29	13
Perpustakaan	231	71	33	24
Laboratorium Komputer	212	64	27	11
Laboratorium IPA	152	37	31	15



Gambar 3.23 Persentase Sarana Prasarana SMP menurut Kondisi

Secara keseluruhan, kondisi sarana prasarana di tingkat SMP lebih baik dibandingkan SD. Pada semua kategori, ruangan dengan kondisi baik sudah di atas 60%, meskipun juga masih ada kondisi rusak sedang dan rusak berat pada semua kategori.

3.3 Data Pokok Pendidikan Nonformal

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) serta Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis/ Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

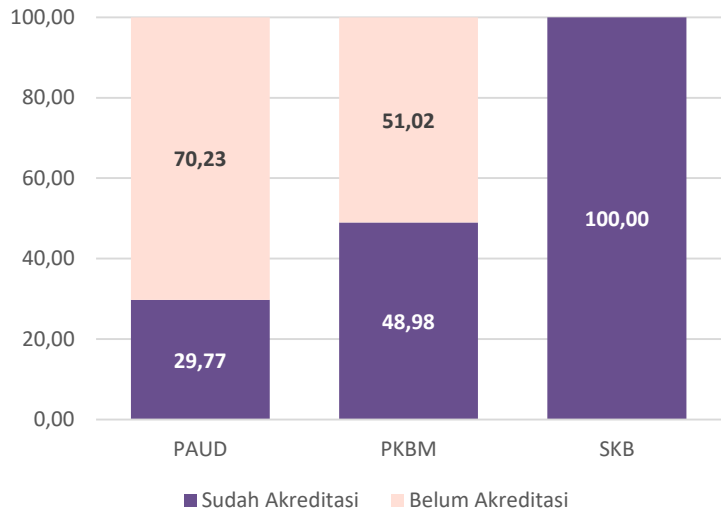
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM menyelenggarakan program pendidikan yaitu Paket A setingkat jenjang SD, Paket B setingkat jenjang SMP dan Paket C setingkat jenjang SMA.

Satuan PNF sejenis atau yang lebih dikenal dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) berbentuk Satuan Pendikan Nonformal Sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

1. Data Lembaga Pendidikan Nonformal

Tabel 3.25 Lembaga Pendidikan Nonformal

Lembaga	Status Satuan Pendidikan	Status Akreditasi		Total
		Sudah Akreditasi	Belum Akreditasi	
PAUD	Negeri	10	6	16
	Swasta	460	1.103	1.563
PKBM	Swasta	48	50	98
SKB	Negeri	1	0	1
Total		519	1.159	1.678

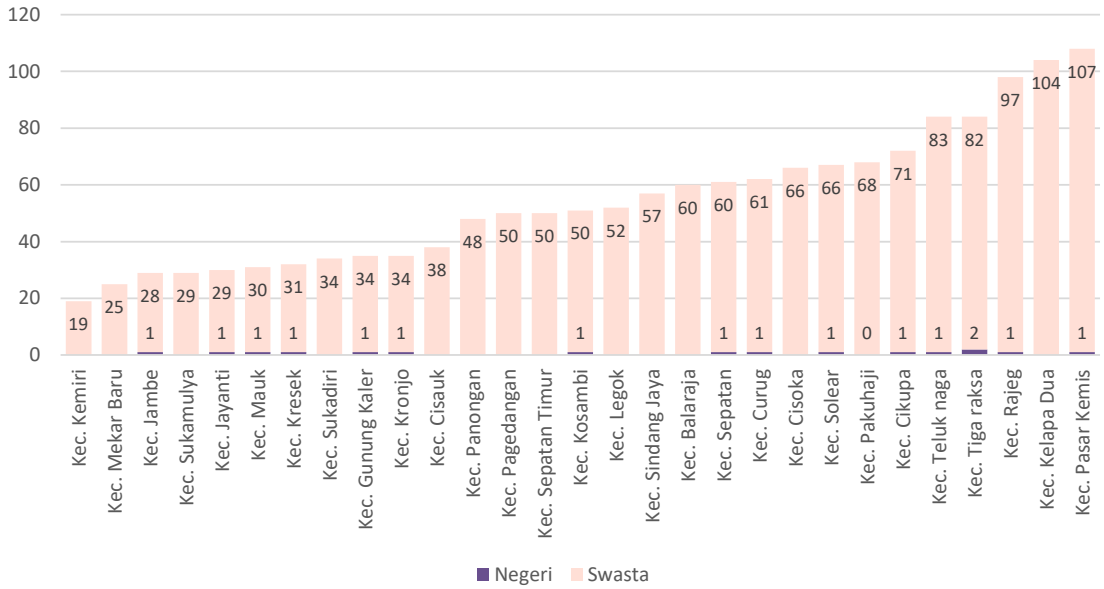


Gambar 3.24 Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal

Berdasarkan Tabel 3.25 dan Gambar 3.24 dapat diketahui bahwa jumlah PAUD di Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 1.579 dengan status 16 PAUD negeri dan 1.563 PAUD swasta. Dari 1.579 PAUD, 470 (29,77%) diantaranya sudah terakreditasi. Kemudian terdapat 98 PKBM, dengan 48 (48,98%) diantaranya sudah terakreditasi, serta terdapat satu SKB dan sudah terakreditasi.

Berikut Sebaran Data Lembaga Pendidikan Nonformal di tiap kecamatan Kabupaten Tangerang:

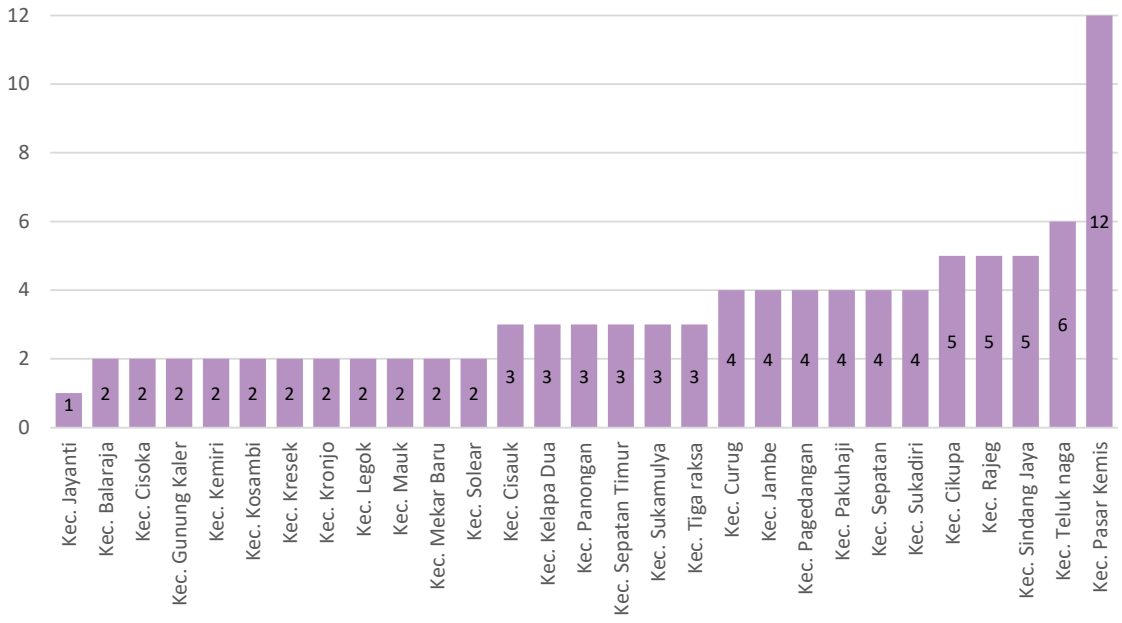
a. *Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*



Gambar 3.25 Sebaran Data PAUD

Sejumlah 1.579 PAUD tersebar di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Tangerang. Lembaga PAUD paling sedikit berada di Kecamatan Kemiri yaitu 19 lembaga dan terbanyak berada di Kecamatan Pasarkemis yaitu sejumlah 108 lembaga. Berdasarkan status lembaga, terdapat 16 satuan pendidikan negeri yang tersebar pada 15 kecamatan (dapat dilihat pada Gambar 3.25).

b. Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)



Gambar 3.26 Sebaran Data PKBM

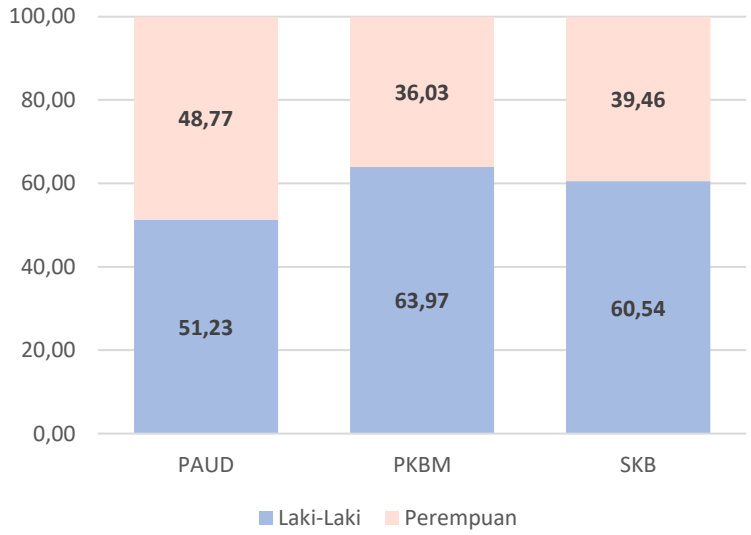
Sejumlah 98 PKBM tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Tangerang. Lembaga PKBM terbanyak berada di Kecamatan Pasarkemis yaitu sejumlah 12 lembaga, kemudian pada Kecamatan Teluk Naga ada 6 lembaga PKBM. Sementara pada kecamatan lainnya, terdapat minimal satu lembaga PKBM.

2. Data Peserta Didik/ Warga Belajar

Peserta Didik pada lembaga Pendidikan Nonformal bervariasi, mulai dari kelompok usia 0 sampai 6 Tahun untuk peserta didik PAUD, usia 7 sampai dengan 18 tahun untuk peserta didik SKB, dan usia 7 sampai dengan tidak terbatas bagi peserta didik PKBM.

Tabel 3.26 Data Peserta Didik/ Warga Belajar

Lembaga	Jumlah Peserta Didik/Warga Belajar		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
PAUD	29.055	27.664	56.719
PKBM	10.119	5.700	15.819
SKB	112	73	185
Total	39.286	33.437	72.723



Gambar 3.27 Persentase Peserta Didik/ Wajib Belajar

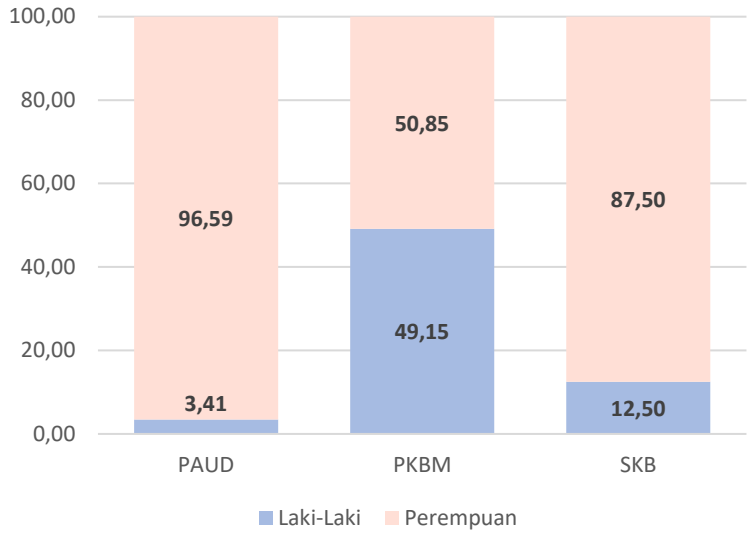
Jumlah peserta didik/warga belajar PAUD di Kabupaten Tangerang yaitu 56.719 orang, dengan proporsi antara laki-laki dan perempuan yang hampir sama, yaitu laki-laki 29.055 (51,23%) dan perempuan 27.664 (48,77%). Kemudian pada PKBM, jumlah warga belajarnya yaitu 15.819 orang, dengan jumlah laki-laki 10.119 (63,97%) dan perempuan 5.700 (36,03%). Sementara pada SKB, terdapat 185 warga belajar dengan 112 (60,54%) diantaranya laki-laki dan 73 (39,46%) orang perempuan.

3. Data Pendidik Nonformal

Pendidik pada Lembaga Pendidikan Nonformal dikenal dengan beberapa istilah yang berbeda; Guru bagi lembaga PAUD, Tutor bagi lembaga PKBM, dan Pamong bagi SKB.

Tabel 3.27 Pendidik Pendidikan Nonformal

Lembaga	Jumlah Peserta Didik/Warga Belajar		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
PAUD	135	3.828	3.963
PKBM	232	240	472
SKB	1	7	8
Total	368	4.075	4.443



Gambar 3.28 Persentase Pendidik Pendidikan Nonformal

Pendidik pada pendidikan nonformal berjumlah 4.443 orang dengan 368 diantaranya laki-laki dan mayoritasnya adalah perempuan, yaitu sejumlah 4.075 orang. Pada PAUD, terdapat 3.963 pendidik dengan 135 (3,41%) pendidik laki-laki dan selebihnya yaitu 3.828 (96,59%) pendidik perempuan. Selanjutnya pada PKBM, terdapat 472 pendidik dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang hampir sama yaitu 232 (49,15%) pendidik laki-laki dan 240 (50,85%) pendidik perempuan. Sementara pada satu SKB, terdapat delapan pendidik yaitu satu (12,50%) pendidik laki-laki dan tujuh (87,50%) pendidik perempuan.

3.4 Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan dapat digambarkan dari peningkatan mutu sekolah/ Lembaga, mutu peserta didik, mutu guru dan mutu sarana prasarana.

1. **Peningkatan Mutu Sekolah/ Lembaga**

   Program peningkatan mutu pendidikan bagi sekolah antara lain:

   a. Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM);
   b. Pemberdayaan Gugus Sekolah Dasar;
   c. Pendampingan Data Pokok Pendidikan;
   d. Pendampingan Sekolah Sasaran Akreditasi;
   e. Jambore Sanitasi Sekolah; dan
   f. Pedampingan Sekolah Model.

2. **Peningkatan Mutu Peserta didik**

   Program peningkatan mutu peserta didik antara lain:

   a. Fasilitasi kegiatan Olimpiade Sains Nasional (O2SN);
   b. Penyelenggaraan Minat Bakat dan Kreativitas Peserta didik;
   c. Pemberdayaan dan Penilaian Budaya Mutu Sekolah berupa Lomba Bidang Pembelajaran, Perpustakaan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Lomba Olahraga;
   d. Sosialisasi Penanaman Pendidikan Anti Korupsi;
   e. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
   f. Sosialisasi Narkoba bagi peserta didik;
   g. Pelatihan Kompetensi Bidang Studi Ekstrakurikuler;
   h. Pelatihan kompetensi Peserta didik berprestasi;
   i. Pendampingan sekolah model dan rujukan;
   j. Pelatihan kompetensi Peserta didik berprestasi;
   k. Peningkatan Prestasi Ekstrakulikuler;
   l. Beapeserta didik Pendidikan Bagi Peserta didik Berprestasi dan MBR; dan
   m. Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3. **Peningkatan Mutu Guru**

   Program peningkatan mutu guru antara lain:

   a. Pengembangan Kurikulum;
   b. Bedah Standar Kelulusan Sekolah (SKL);
   c. Pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS);

d. Sosialisasi kurikulum SMP dan pengembangan kompetensi pembelajaran dikelas;
e. Pelatihan penyusunan kurikulum 2013;
f. Pedampingan Implementasi Kurikulum 2013;
g. Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
h. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi;
i. Peningkatan Kompetensi Dan Sertifikasi Calon Kepala Satuan Pendidikan Dasar;
j. Sosialisasi perundang-undangan bagi Guru Pendidikan dasar;
k. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Profesi Guru; dan
l. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan.

4. Peningkatan Mutu Sarana Prasarana

Program peningkatan mutu sarana prasarana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana sekolah secara bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan berupa:

a. Rehabilitasi ruang kelas;
b. Penambahan ruang kelas baru;
c. Penyediaan mebeulair;
d. Penyediaan alat praktik/ peraga/Media Pembelajaran;
e. Penyediaan Perpustakaan dan Perabotnya;
f. Penyediaan Laboratorium IPA; dan
g. Penyediaan Laboratorium Komputer.

Peningkatan mutu sarana prasarana tersebut bersumber dari Pemerintah pusat, Provinsi, APBD Murni Kabupaten Tangerang dan *stakeholder* lain dalam bentuk program Bantuan Pemerintah, Bantuan Provinsi, Bantuan Sosial, DAK dan/ atau CSR.

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Abdul Hamid No.20, Kadu Agung,
Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang,
Banten 15720